

**PROYEKSI KEMISKINAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**( Periode Tahun 2006-2017)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh

**ANGKEPRANITA DHYAN NARESWARI**

**NIM. C2B607005**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2014**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Angkepranita Dhyan Nareswari

Nomor Induk Mahasiswa : C2B607005

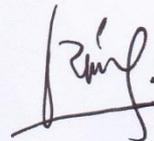
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP

Judul Skripsi : **PROYEKSI KEMISKINAN PPROVINSI  
JAWA TENGAH  
(Periode Tahun 2006-2017)**

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si

Semarang, 14 Februari 2014

Dosen Pembimbing,



(Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si)

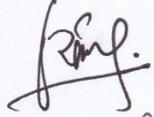
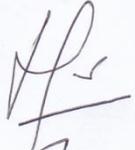
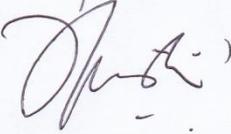
NIP. 196602101992032001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Angkepranita Dhyan Nareswari  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B607005  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ IESP  
Judul Skripsi : **PROYEKSI KEMISKINAN PROVINSI  
JAWA TENGAH  
( Periode Tahun 2006 - 2017)**

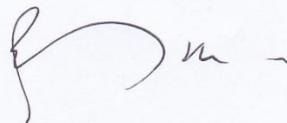
Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 26 MARET 2014

Tim Peguji:

1. Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si (  )
2. Johanna Maria Kodoatie, SE, M.Ec, Ph.D (  )
3. Hastarini Dwi Atmanti, SE, MSi (  )

Mengetahui,

Pembantu Dekan I



Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Angkepranita Dhyan Nareswari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: PROYEKSI KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Februari 2014

Yang membuat pernyataan,



(Angkepranita Dhyan Nareswari)

NIM: C2B607005

## ABSTRAK

Kemiskinan adalah persoalan klasik dalam sebuah pembangunan yang memiliki sifat multidimensi tentang ukuran kesejahteraan hidup seseorang. Dalam teori lingkaran kemiskinan Nurkse disebutkan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi munculnya masalah kemiskinan berawal dari keterbatasan dalam hal permodalan, baik itu modal fisik (pendapatan) maupun modal manusia. Jika demikian maka seharusnya penanganan masalah kemiskinan dipusatkan pada perbaikan hal-hal yang dianggap memunculkan permasalahan tersebut. Penanganan itu harus dilakukan secara kontinyu dan terarah. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan penurunan kemiskinan yang berorientasi pada target, agar penurunan kemiskinan dapat tercapai tetapi tetap terarah.

Jawa Tengah sebagai bagian dari wilayah Negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk miskin terbesar juga memiliki target penurunan kemiskinan untuk daerahnya. Tidak tercapainya target penurunan kemiskinan pada tahun 2011, memperlihatkan bahwa dukungan pemerintah terhadap program-program penanggulangan kemiskinan masih kurang optimal memberikan hasil. Untuk itu pemerintah perlu mencari tahu secara lebih cermat hal-hal yang menyebabkan mengapa target yang ingin dicapai tersebut tidak dapat tepat sasaran. Penelitian lebih mendalam untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya realisasi dengan target sangat diperlukan sebab masih berkaitan dengan target yang belum terwujudkan untuk tahun 2013. Untuk memantau pencapaian target tahun 2013 mendatang, penelitian ini akan mencoba memproyeksi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 hingga tahun 2017 mendatang. Penelitian ini selain bertujuan memproyeksi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, juga memiliki tujuan lain yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Oleh karena itu, obyek penelitian yang akan dianalisis adalah variabel yang dianggap mempengaruhi kemiskinan menurut teori lingkaran kemiskinan Nurkse, seperti pendidikan (lama sekolah dan Melek huruf), kesehatan (angka harapan hidup), dan pendapatan (pendapatan perkapita). Untuk penelitian yang membahas faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan, penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan model Least Square Dummy Variabel. Untuk proyeksi, penelitian ini menggunakan metode ramalan trend dan regresi sederhana. Periode waktu yang digunakan untuk penelitian ini dari tahun 2006-2010.

Hasil analisis dengan menggunakan LSDV diketahui bahwa variabel pendapatan, kesehatan dan pendidikan memiliki hubungan yang terbalik terhadap kemiskinan. Akan tetapi dari ketiga variabel tersebut, variabel yang benar-benar berpengaruh banyak pada perubahan tingkat kemiskinan adalah pendapatan dan kesehatan. Untuk hasil proyeksi, target penurunan kemiskinan tahun 2013 tercapai sesuai target.

Kata kunci : Tingkat Kemiskinan, Kesehatan (Harapan Hidup), dan Pendapatan (Pendapatan Perkapita), Proyeksi

## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah S.W.T karena atas rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “ Proyeksi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (Periode Tahun 2006 – 2017) ”, sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tidak terlepas dari dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan seluruh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah S.W.T Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluargaku, khususnya untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak (Imam Syafii) dan Ibu (Endah Yuliasuti) serta adikku (Fauzi Insaf Fardhani) terimakasih atas doa, kasih sayang, kepercayaan serta dorongan semangat yang telah diberikan pada penulis.
3. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof. Drs. H. Waridin, MS., Ph.D selaku dosen wali dan seluruh dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan nasehat dan ilmu yang

bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

5. Ibu Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, serta dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian ini.
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan yang diberikan.
7. Terimakasih kepada Ibu Siti Nuraini (Bude Nunuk), Pakde Susilo, Mas Danny, Mas Firin, Mbak Hesti atas dukungan dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam segala hal.
8. Sahabat-sahabatku Merna, Yulianita, Linda, Dinar, Arfita, Rani, Putria, Lina, Nurma, terimakasih atas doa dan perhatian kalian.
9. Teman-temanku di IESP 2007, Nugroho, Talita, Anto, Margin, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan semangat dan bantuan yang telah kalian berikan selama proses pembuatan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada petugas perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan dalam pengumpulan data dan referensi yang bermanfaat.
11. Teman-teman KKN Kel.Tembalang, Kec.Tembalang (Mas Ade, Mas Nafi, Mas Aryo, Mas Bhayu, Mas Annam, Mas Kevin, Mahfud, Kordes Bayu, Lukman, Mbak Indin, Mbak Denna, Mbak Lulud, Mbak Anggun, Mbak Jessi,

Metta, Titi, dan Chris). Terima kasih untuk kebersamaannya selama masa KKN.

12. Kepada pihak-pihak yang terkait yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 14 Februari 2014

Penulis,



Angkepranita Dhyan Nareswari

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                                | i       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                          | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....           | iii     |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....              | iv      |
| ABSTRAK .....                                      | v       |
| KATA PENGANTAR .....                               | vi      |
| DAFTAR TABEL .....                                 | x       |
| DAFTAR GAMBAR .....                                | xii     |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                              | xiii    |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                           | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                           | 1       |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                          | 14      |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....           | 15      |
| 1.3.1 Tujuan .....                                 | 15      |
| 1.3.2 Kegunaan .....                               | 16      |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                    | 16      |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....                     | 18      |
| 2.1 Landasan Teori .....                           | 18      |
| 2.1.1 Definisi Kemiskinan .....                    | 18      |
| 2.1.2 Ciri Kemiskinan .....                        | 20      |
| 2.1.3 Indikator Kemiskinan .....                   | 23      |
| 2.1.4 Teori Kemiskinan .....                       | 28      |
| 2.1.5 Pertumbuhan dan Kemiskinan .....             | 36      |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                     | 38      |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....                       | 40      |
| 2.4 Hipotesis .....                                | 45      |
| BAB III. METODE PENELITIAN .....                   | 46      |
| 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian ..... | 46      |
| 3.2 Jenis dan Sumber Data .....                    | 48      |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data .....                  | 49      |
| 3.4 Metode Analisis .....                          | 49      |
| 3.4.1 Metode Analisis Data Panel .....             | 50      |
| 3.4.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik .....     | 57      |
| A. Deteksi Normalitas .....                        | 58      |
| B. Deteksi Multikolinearitas .....                 | 58      |
| C. Deteksi Heteroskedastisitas .....               | 59      |
| D. Deteksi Autokorelasi .....                      | 60      |
| 3.4.3 Pengujian Statistik .....                    | 61      |
| A. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....           | 61      |
| B. Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F) .....    | 62      |

|  | Halaman   |
|--|-----------|
| C. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .....                             | 63        |
| 3.4.4 Estimasi Model .....   | 65        |
| 3.5 Proyeksi Kemiskinan .....  | 69        |
| <b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>71</b> |
| 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....   | 71        |
| 4.1.1 Kondisi Geografis .....  | 71        |
| 4.1.2 Keadaan Penduduk .....   | 71        |
| 4.1.3 Kemiskinan .....   | 72        |
| 4.1.4 Pendidikan .....   | 75        |
| A. Angka Melek Huruf. ....   | 78        |
| B. Rata – Rata Lama Sekolah .....  | 80        |
| 4.1.5 Angka Harapan Hidup .....  | 82        |
| 4.1.6 Pendapatan Perkapita .....   | 84        |
| 4.2 Analisis Data .....  | 85        |
| 4.2.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik .....                                     | 86        |
| A. Deteksi Normalitas .....  | 86        |
| B. Deteksi Autokorelasi .....  | 86        |
| C. Deteksi Heteroskedastisitas .....   | 87        |
| D. Deteksi Multikolinearitas .....   | 88        |
| 4.2.2 Hasil Regresi .....  | 89        |
| 4.2.3 Analisis Statistik .....   | 89        |
| A. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....   | 89        |
| B. Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji F) .....                                    | 89        |
| C. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .....                             | 90        |
| 4.3 Intepretasi Hasil dan Pembahasan .....   | 94        |
| 4.3.1 Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Kemiskinan .....                            | 95        |
| 4.3.2 Pengaruh Angka Rata – Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat<br>Kemiskinan ..... | 96        |
| 4.3.3 Pengaruh Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan .....                         | 97        |
| 4.3.4 Pengaruh Angka Harapan Hidup Terhadap Kemiskinan .....                       | 99        |
| 4.3.5 Pengaruh Dummy Variabel Terhadap Kemiskinan .....                            | 100       |
| 4.3.6 Proyeksi Tingkat Kemiskinan .....  | 102       |

|   | Halaman |
|---|---------|
| BAB V. PENUTUP .....                                  | 104     |
| 5.1 Kesimpulan .....                                  | 104     |
| 5.2 Keterbatasan .....                                | 105     |
| 5.3 Saran .....                                       | 105     |
| <br>DAFTAR PUSTAKA .....                              | <br>108 |
| LAMPIRAN A ( Data dan Hasil Regresi Utama) .....      | 112     |
| LAMPIRAN B (Heteroskedastisitas dan Normalitas) ..... | 119     |
| LAMPIRAN C (Hasil Proyeksi Kemiskinan) .....          | 122     |

## DAFTAR TABEL

|           | Halaman  |
|-----------|--|
| Tabel 1.1 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006 – 2011 ..... 5   |
| Tabel 1.2 | Jumlah Penduduk Miskin dan Proporsi Penduduk Miskin Provinsi di Indonesia ..... 6  |
| Tabel 1.3 | Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah ..... 8   |
| Tabel 1.4 | Pendapatan Perkapita Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah ..... 10  |
| Tabel 1.5 | Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2011 ..... 12             |
| Tabel 1.6 | Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah Masyarakat Antar Provinsi di Pulau Jawa ..... 13                       |
| Tabel 3.1 | Kriteria Pengujian Durbin Watson ..... 60  |
| Tabel 4.1 | Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2010 ..... 74  |
| Tabel 4.2 | Kabupaten/Kota dengan Tingkat Kemiskinan Diatas dan Dibawah Rata-Rata Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2010 ..... 75 |
| Tabel 4.3 | Tingkat Melek Huruf Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2010 ..... 79  |
| Tabel 4.4 | Angka Rata - Rata Lama Sekolah Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2010 ..... 81                                 |

|           | Halaman  |
|-----------|--|
| Tabel 4.5 | Data Angka Harapan Hidup Masyarakat 35 Kabupaten/Kota<br>Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 – 2010 ..... 83 |
| Tabel 4.6 | Hasil Regresi ..... 89   |
| Tabel 4.7 | Nilai t – statistik Hasil Regresi..... 91  |
| Tabel 4.8 | Intepretasi Koefisien Dummy ..... 101  |

## DAFTAR GAMBAR

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2011 .....  | 5       |
| Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier .....  | 30      |
| Gambar 2.2 Teori Lingkaran Nurkse .....  | 31      |
| Gambar 2.3 Kurva Penghasilan dan Biaya Pribadi .....   | 34      |
| Gambar 2.4 Skema Kerangka Pemikiran Teoritis .....   | 44      |
| Gambar 3.1 Aturan Membandingkan Uji Durbin Watson dengan Tabel Durbin Watson .....   | 60      |
| Gambar 3.2 Hipotesis Uji F Menggunakan Uji Satu Arah .....   | 63      |
| Gambar 3.3 Hipotesis Uji t Menggunakan Uji Satu Arah .....   | 65      |
| Gambar 4.1 Rata – Rata Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Masyarakat 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 -2010..... | 85      |
| Gambar 4.2 Hasil Durbin Watson .....   | 87      |
| Gambar 4.3 Angka Harapan Hidup dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah .....   | 100     |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran A. Data dan Hasil Regresi Utama .....      | 112     |
| Lampiran B. Heteroskedastisitas dan Normalitas..... | 119     |
| Lampiran C. Hasil Proyeksi Kemiskinan .....         | 122     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara di dunia pasti mendambakan tercapainya kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Untuk mendapatkan hasil terbaik, tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Segala usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditempuh dan dikelola dengan baik agar hasil akhir yang diinginkan dapat dicapai. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan selalu melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dari program-program pembangunan yang telah dijalankan. Evaluasi dari pelaksanaan program-program pembangunan sangat diperlukan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan lebih baik. Tujuannya tentu agar tercapai kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan menyeluruh pada seluruh golongan masyarakat.

Salah satu permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi sorotan dan persoalan dalam pembangunan adalah persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan dirasakan oleh setiap negara di dunia, baik itu Negara Maju maupun Negara Sedang Berkembang. Beberapa negara di dunia pun bahkan sampai sekarang masih menghadapi persoalan kemiskinan, khususnya Negara Sedang Berkembang.

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan rumit yang tidak memiliki ujung pangkal. Hal itu dikarenakan, banyak faktor yang dapat menyebabkan

munculnya masalah kemiskinan, begitu juga kemiskinan dapat memunculkan masalah ekonomi pembangunan lainnya. Oleh karenanya, persoalan kemiskinan sering disebut dengan istilah lingkaran setan yang tidak berujung pangkal.

Indonesia merupakan salah satu Negara Sedang Berkembang yang hingga saat ini masih menghadapi persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan bahkan telah dihadapi Indonesia sepanjang perjalanan pembangunannya dari tahun 1976 s/d sekarang. Banyaknya fakir miskin, gelandangan, pengemis, balita kurang gizi, dan anak-anak jalanan menjadi cerminan kondisi kemiskinan di Indonesia.

Persoalan kemiskinan telah menjadi persoalan global di seluruh dunia. Hal itu terlihat dalam sebuah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York tahun 2000 lalu. Dimana dalam pertemuan itu, persoalan mengenai kemiskinan menjadi salah satu wacana yang didiskusikan disana. Pertemuan tersebut digagas sebagai bentuk rasa kepedulian secara global terhadap kesejahteraan masyarakat dunia.

Dalam pertemuan yang dihadiri para kepala negara dan perwakilan dari 189 negara anggota PBB tersebut, telah disepakati sebuah kesepakatan bersama. Hasil dari kesepakatan yang dikenal dengan sebutan “Millenium Development Goals (MDGs)” tersebut, memuat 8 program sosial yang wajib dicapai tahun 2015 mendatang. Kedelapan program yang menjadi tujuan MDGs meliputi perbaikan di bidang kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kedelapan program tersebut

merupakan program-program tujuan dari MDGs yang ingin menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan.

Setiap negara didunia baik Negara Maju dan Negara Sedang Berkembang pasti merasakan persoalan kemiskinan, akan tetapi permasalahan kemiskinan yang dialami tiap negara tentu berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan angka kemiskinan dan kesulitan dalam mengatasinya. Umumnya kesulitan dalam mengatasi masalah kemiskinan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Artinya semakin besar angka kemiskinan maka semakin besar pula tingkat kesulitan dalam mengatasinya (M.Sofyan, dkk, 2010).

Kesulitan besar dalam mengatasi masalah kemiskinan selain karena pengaruh dari banyaknya jumlah penduduk, juga terlihat dalam hal definisi dan penentuan kriterianya. Dalam hal definisi saja, dari berbagai sumber yang ada banyak ditemui beragam definisi mengenai kemiskinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa konsep kemiskinan dapat berbeda dan sangat bergantung terhadap cara pandang seseorang dalam menilai permasalahan dan mendefinisikan kemiskinan. Oleh karenanya patokan definisi yang tepat sangat diperlukan untuk menggambarkan kondisi miskin, agar permasalahan kemiskinan dapat menjadi jelas dan mudah diteliti.

Kemiskinan digambarkan memiliki banyak dimensi dan definisi. Umumnya dimensi yang sering digunakan sebagai dimensi penilaian adalah dari dimensi ekonomi. Beberapa definisi yang adapun sebenarnya sama-sama menyoroti hal yang sama yaitu mengenai kebutuhan dasar. Perbedaannya

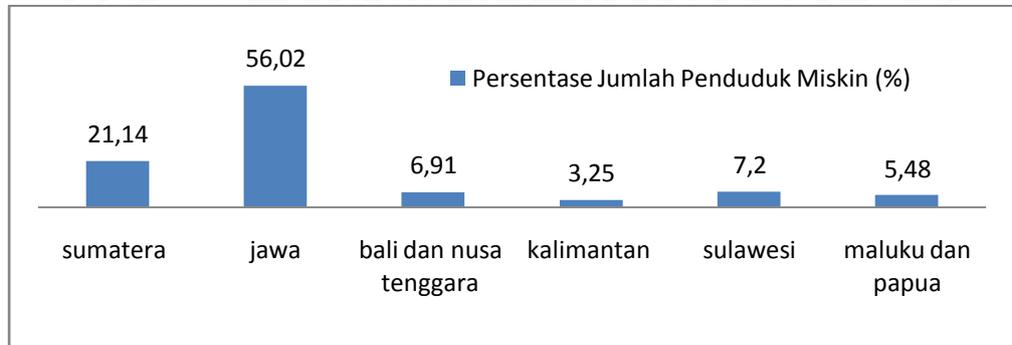
hanya pada ukuran garis kemiskinan yang digunakan, seperti pendapatan / pengeluaran per kapita dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Sumber dari luar negeri yaitu World Bank menggunakan ukuran pendapatan US\$ 1 – 2 per hari dalam menggambarkan kemiskinan. Di dalam negeri, BPS menggunakan ukuran pengeluaran kebutuhan minimum untuk makanan ditambah non makanan dalam menggambarkan kemiskinan. Oleh karena itu ukuran garis kemiskinan berbeda untuk setiap wilayah dan negara.

Untuk standar yang digunakan dalam penilaian kriteria kemiskinan umumnya oleh BPS maupun World Bank sama-sama menyorotinya dari keadaan penduduk yang kehidupannya berada dibawah rata-rata. Kehidupan dibawah rata-rata dapat ditunjukkan dalam bentuk rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, akses terhadap sanitasi, air bersih, keamanan, dan sebagainya.

Berdasarkan publikasi BPS, persentase jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2011 berjumlah  $\pm$  29,89 juta jiwa. Total penduduk miskin Indonesia tersebut terbagi-bagi ke dalam 6 jajarannya pulau, dimana Pulau Sumatera memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 6.318.870 jiwa, Jawa (16.744.410 jiwa), Kalimantan (971.880 jiwa), Bali dan Nusa Tenggara (2.065.820 jiwa), Sulawesi (2.152.150 jiwa), Maluku dan Papua (1.637.000 jiwa). Jika dilihat dari seluruh total penduduk miskin antar pulau di Indonesia, terlihat bahwa sebagian besar penduduk miskin lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan total jumlah penduduk miskin 16,74 juta jiwa atau 56,02% dari total penduduk miskin Indonesia (Gambar 1.1).

**Gambar 1.1**  
**Persentase Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau di Indonesia**



Sumber : BPS, 2011

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin antar pulau dan hasil perhitungan proporsi seluruh penduduk miskin per provinsi di Indonesia diperoleh 3 provinsi di pulau jawa, yang memiliki penduduk miskin terbesar. Ketiga provinsi tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Tabel 1.2). Tabel proporsi penduduk miskin disini merupakan hasil perbandingan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui daerah berpenduduk miskin terbesar secara nasional.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006 s/d 2011**

| PROVINSI    | PERSENTASE KEMISKINAN (%) | JUMLAH PENDUDUK MISKIN ( Jiwa ) |         |         |         |         |         | Rata-Rata |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|             |                           | 2006                            | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    |           |
| JATENG      |                           | 7100600                         | 6557200 | 6122600 | 5725700 | 5369200 | 5255990 | 6021882   |
|             |                           | 22.19                           | 20.43   | 19.23   | 17.72   | 16.56   | 16.21   | 18.72     |
| DIY         |                           | 648700                          | 633500  | 608900  | 585800  | 577300  | 564230  | 603072    |
|             |                           | 19.15                           | 18.99   | 18.32   | 17.23   | 16.83   | 16.14   | 17.78     |
| JATIM       |                           | 7678100                         | 7155300 | 6549000 | 6022600 | 5529300 | 5227310 | 6360268   |
|             |                           | 21.09                           | 19.98   | 18.51   | 16.68   | 15.26   | 13.85   | 17.56     |
| JABAR       |                           | 5712500                         | 5457900 | 5249500 | 4983600 | 4773700 | 4650810 | 5138002   |
|             |                           | 14.49                           | 13.55   | 13.01   | 11.96   | 11.27   | 10.57   | 12.48     |
| BANTEN      |                           | 904300                          | 886200  | 830400  | 788100  | 758200  | 690870  | 809678    |
|             |                           | 9.79                            | 9.07    | 8.15    | 7.64    | 7.16    | 6.26    | 8.01      |
| DKI JAKARTA |                           | 407100                          | 405700  | 342500  | 323200  | 312200  | 355200  | 357650    |
|             |                           | 4.57                            | 4.61    | 4.29    | 3.62    | 3.48    | 3.64    | 4.04      |

Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan

Berdasar hasil penelusuran terhadap 6 provinsi di Pulau Jawa diketahui bahwa rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode 2006-2010 merupakan yang paling tinggi dibanding provinsi lain di pulau jawa yaitu sebesar 18,72%.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Proporsi Penduduk Miskin Antar**  
**Provinsi di Indonesia**

| PROVINSI           | JUMLAH PENDUDUK MISKIN ( Jiwa ) |                 |                 |                 |                 |                 | PROPORSI PENDUDUK MISKIN (%) |            |            |            |            |            |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | 2006                            | 2007            | 2008            | 2009            | 2010            | 2011            | 2006                         | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       |
| NAD                | 1149700                         | 1083700         | 962300          | 892900          | 861900          | 900190          | 2.93                         | 2.92       | 2.79       | 2.74       | 2.78       | 3.01       |
| Sumatera Utara     | 1897100                         | 1768500         | 1611500         | 1499700         | 1490900         | 1421440         | 4.83                         | 4.76       | 4.67       | 4.61       | 4.81       | 4.76       |
| Sumatera Barat     | 578700                          | 529200          | 473700          | 429300          | 430000          | 441800          | 1.47                         | 1.42       | 1.37       | 1.32       | 1.39       | 1.48       |
| Riau               | 564900                          | 574500          | 584700          | 527500          | 500200          | 472450          | 1.44                         | 1.55       | 1.69       | 1.62       | 1.61       | 1.58       |
| Jambi              | 304600                          | 281900          | 261200          | 249700          | 241600          | 251790          | 0.78                         | 0.76       | 0.76       | 0.77       | 0.78       | 0.84       |
| Sumatera Selatan   | 1446900                         | 1331800         | 1254300         | 1167900         | 1125700         | 1061870         | 3.68                         | 3.58       | 3.63       | 3.59       | 3.63       | 3.55       |
| Bengkulu           | 360000                          | 370600          | 328900          | 324100          | 324900          | 303350          | 0.92                         | 1.00       | 0.95       | 1.00       | 1.05       | 1.01       |
| Lampung            | 1638000                         | 1661700         | 1597800         | 1558300         | 1479900         | 1277930         | 4.17                         | 4.47       | 4.63       | 4.79       | 4.77       | 4.28       |
| Bangka Belitung    | 117400                          | 95100           | 80300           | 76600           | 67800           | 65550           | 0.30                         | 0.26       | 0.23       | 0.24       | 0.22       | 0.22       |
| Kepulauan Riau     | 163000                          | 148400          | 131800          | 128200          | 129700          | 122500          | 0.41                         | 0.40       | 0.38       | 0.39       | 0.42       | 0.41       |
| DKI Jakarta        | 407100                          | 405700          | 342500          | 323200          | 312200          | 355200          | 1.04                         | 1.09       | 0.99       | 0.99       | 1.01       | 1.19       |
| Jawa Barat         | 5712500                         | 5457900         | 5249500         | 4983600         | 4773700         | 4650810         | 14.54                        | 14.68      | 15.20      | 15.32      | 15.39      | 15.56      |
| Jawa Tengah        | 7100600                         | 6557200         | 6122600         | 5725700         | 5369100         | 5255990         | 18.07                        | 17.64      | 17.72      | 17.60      | 17.31      | 17.58      |
| DIY                | 648700                          | 633500          | 608900          | 585800          | 577300          | 564230          | 1.65                         | 1.70       | 1.76       | 1.80       | 1.86       | 1.89       |
| Jawa Timur         | 7678100                         | 7155300         | 6549000         | 6022600         | 5529300         | 5227310         | 19.54                        | 19.25      | 18.96      | 18.51      | 17.82      | 17.49      |
| Banten             | 904300                          | 886200          | 830400          | 788100          | 758200          | 690870          | 2.30                         | 2.38       | 2.40       | 2.42       | 2.44       | 2.31       |
| Bali               | 243500                          | 229100          | 205700          | 181700          | 174900          | 183130          | 0.62                         | 0.62       | 0.60       | 0.56       | 0.56       | 0.61       |
| NTB                | 1156100                         | 1118600         | 1068800         | 1050900         | 1009300         | 896190          | 2.94                         | 3.01       | 3.09       | 3.23       | 3.25       | 3.00       |
| NTT                | 1273900                         | 1163600         | 1105800         | 1013100         | 1014100         | 986500          | 3.24                         | 3.13       | 3.20       | 3.11       | 3.27       | 3.30       |
| Kalimantan Barat   | 626700                          | 584300          | 502800          | 434800          | 428700          | 376120          | 1.59                         | 1.57       | 1.46       | 1.34       | 1.38       | 1.26       |
| Kalimantan Tengah  | 212800                          | 210300          | 194300          | 165900          | 164200          | 150020          | 0.54                         | 0.57       | 0.56       | 0.51       | 0.53       | 0.50       |
| Kalimantan Selatan | 278500                          | 233500          | 211100          | 176000          | 182000          | 198610          | 0.71                         | 0.63       | 0.61       | 0.54       | 0.59       | 0.66       |
| Kalimantan Timur   | 335500                          | 324800          | 259500          | 239200          | 243000          | 247130          | 0.85                         | 0.87       | 0.75       | 0.74       | 0.78       | 0.83       |
| Sulawesi Utara     | 249400                          | 250100          | 218200          | 219600          | 206700          | 194720          | 0.63                         | 0.67       | 0.63       | 0.68       | 0.67       | 0.65       |
| Sulawesi Tengah    | 553500                          | 557400          | 525200          | 489800          | 475000          | 432070          | 1.41                         | 1.50       | 1.52       | 1.51       | 1.53       | 1.45       |
| Sulawesi Selatan   | 1112000                         | 1083400         | 1042200         | 963600          | 913400          | 835510          | 2.83                         | 2.91       | 3.02       | 2.96       | 2.94       | 2.80       |
| Sulawesi Tenggara  | 466800                          | 465400          | 437100          | 434300          | 400700          | 334280          | 1.19                         | 1.25       | 1.27       | 1.34       | 1.29       | 1.12       |
| Gorontalo          | 273800                          | 241900          | 182900          | 224600          | 209800          | 192400          | 0.70                         | 0.65       | 0.53       | 0.69       | 0.68       | 0.64       |
| Sulawesi Barat     | 205200                          | 189900          | 156900          | 158200          | 141300          | 163180          | 0.52                         | 0.51       | 0.45       | 0.49       | 0.46       | 0.55       |
| Maluku             | 418600                          | 404700          | 388800          | 380000          | 378600          | 356400          | 1.07                         | 1.09       | 1.13       | 1.17       | 1.22       | 1.19       |
| Maluku Utara       | 116800                          | 109900          | 107900          | 98000           | 91000           | 107080          | 0.30                         | 0.30       | 0.31       | 0.30       | 0.29       | 0.36       |
| Papua Barat        | 284100                          | 266800          | 237300          | 256800          | 256300          | 227120          | 0.72                         | 0.72       | 0.69       | 0.79       | 0.83       | 0.76       |
| Papua              | 816700                          | 793400          | 709300          | 760300          | 761600          | 946390          | 2.08                         | 2.13       | 2.05       | 2.34       | 2.45       | 3.17       |
| <b>Indonesia</b>   | <b>39295300</b>                 | <b>37168300</b> | <b>34543000</b> | <b>32530000</b> | <b>31023400</b> | <b>29890140</b> | <b>100</b>                   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan berbagai tahun terbitan

Jika dilihat berdasarkan prestasi, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki peranan besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi dalam prestasi menurunkan persentase kemiskinannya, provinsi ini masih kalah dengan provinsi tetangganya yaitu Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin hampir sama dengan Jawa Tengah ternyata mampu menurunkan persentase kemiskinan dibawah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program penurunan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur cukup memberi dampak terhadap penurunan kemiskinan di wilayahnya.

Selaras dengan salah satu program yang menjadi tujuan MDGs Indonesia, persoalan kemiskinan pun kini telah menjadi prioritas utama program pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut terbukti dalam Renstra Jawa Tengah ( Perda No. 11/2003 ), Pergub 19 tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra, Keputusan Gubernur No. 412.6.05/55/2006 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah tahun 2005-2025, dimana kemiskinan merupakan salah satu isu strategis yang perlu mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya (Bappeda Jawa Tengah, 2011).

Perkembangan kondisi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah menunjukkan pola penurunan. Hal ini terbukti dimana pada tahun 2006 persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah semula sebesar 22,19% turun

menjadi 16,21% (2011). Akan tetapi dalam laporan RPJMD 2008-2013 Provinsi Jawa Tengah, ternyata realisasi target penurunan persentase kemiskinan tahun 2011 melebihi target (Tabel 1.3). Berdasar data tersebut, dapat digambarkan bahwa usaha pemerintah daerah dalam menekan kemiskinan masih belum optimal.

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin**  
**Provinsi Jawa Tengah**

| TAHUN | PENDUDUK MISKIN |               |
|-------|-----------------|---------------|
|       | TARGET (%)      | REALISASI (%) |
| 2009  | 20.95           | 17.72         |
| 2010  | 17              | 16.56         |
| 2011  | 15 -16          | 16.21         |
| 2012  | 14.34           | -             |
| 2013  | 13.27           | -             |

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Bappenas

Guna mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, untuk itu perlu diketahui lebih dulu mengenai kondisi kesejahteraan sosial masyarakatnya. Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan (Edi Suharto, 2005). Untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup, peranan pendapatan sangat diperlukan disini.

Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang, atau hal materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan / jasa manusia atau bisa diartikan juga jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang selama jangka waktu tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 2002).

Secara riil, konsep pendapatan dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi kesejahteraan sosial seseorang.

Pengaruh pendapatan bagi keberlangsungan hidup seseorang sangat penting, diakui atau tidak. Hal ini dikarenakan pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan bentuk usaha seseorang dalam rangka meningkatkan standar hidupnya. Guna melihat perkembangan pendapatan penduduk disuatu wilayah setiap tahunnya, umumnya alat ukur yang dipergunakan adalah pendapatan regional.

Pendapatan regional atau biasa disebut Produk Domestik Regional Bruto didefinisikan BPS sebagai jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Jumlah seluruh nilai inilah yang dicirikan sebagai jumlah pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut. Pendapatan regional yang diterima penduduk disini belum mencerminkan pendapatan sebenarnya penduduk yang bersangkutan, karena masih menjadi milik pihak lain (pemilik modal). Oleh karena itu untuk mengetahui besaran sebenarnya dari pendapatan yang menjadi milik penduduk wilayah bersangkutan, maka digunakanlah besaran hitungan pendapatan regional perkapita.

Pendapatan regional perkapita dihitung dari pendapatan regional yang telah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Fungsi dari pendapatan perkapita inilah yang nantinya akan digunakan untuk melihat dan memantau pendapatan penduduk suatu daerah secara riil, karena didalamnya sudah tidak terdapat unsur pendapatan yang menjadi hak pihak lainnya.

**Tabel 1.4**  
**Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**

| PROVINSI          | Pendapatan Per Kapita (000 Rp) |            |            |            |            | Rata-Rata<br>Pertumbuhan |
|-------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                   | 2006                           | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       |                          |
| Kab. Cilacap      | 6,561,371                      | 6,863,610  | 7,185,351  | 7,548,193  | 7,919,327  | 4.82                     |
| Kab. Banyumas     | 2,525,956                      | 2,646,187  | 2,774,945  | 2,914,070  | 3,060,905  | 4.92                     |
| Kab. Purbalingga  | 2,475,668                      | 2,608,376  | 2,725,908  | 2,865,437  | 3,006,980  | 4.98                     |
| Kab. Banjarnegara | 2,768,937                      | 2,888,146  | 3,012,254  | 3,146,755  | 3,277,597  | 4.31                     |
| Kab. Kebumen      | 2,048,335                      | 2,127,930  | 2,238,240  | 2,313,536  | 2,392,844  | 3.97                     |
| Kab. Purworejo    | 3,410,324                      | 3,602,377  | 3,789,442  | 3,962,525  | 4,132,055  | 4.92                     |
| Kab. Wonosobo     | 2,158,701                      | 2,225,669  | 2,297,799  | 2,380,451  | 2,465,341  | 3.38                     |
| Kab. Magelang     | 2,957,446                      | 3,085,090  | 3,212,407  | 3,337,322  | 3,463,580  | 4.03                     |
| Kab. Boyolali     | 3,885,936                      | 4,018,559  | 4,155,036  | 4,343,873  | 4,468,874  | 3.56                     |
| Kab. Klaten       | 3,783,068                      | 3,893,060  | 4,031,026  | 4,187,981  | 4,230,698  | 2.84                     |
| Kab. Sukoharjo    | 5,071,919                      | 5,284,141  | 5,492,630  | 5,706,628  | 5,930,669  | 3.99                     |
| Kab. Wonogiri     | 2,587,593                      | 2,710,930  | 2,819,122  | 2,945,692  | 3,017,176  | 3.92                     |
| Kab. Karanganyar  | 5,512,915                      | 5,778,118  | 6,032,191  | 6,313,912  | 6,609,651  | 4.64                     |
| Kab. Sragen       | 2,856,891                      | 3,010,445  | 3,171,902  | 3,353,104  | 3,531,690  | 5.44                     |
| Kab. Grobogan     | 2,037,957                      | 2,110,729  | 2,206,649  | 2,301,168  | 2,400,500  | 4.18                     |
| Kab. Blora        | 2,103,843                      | 2,177,959  | 2,291,493  | 2,399,197  | 2,506,285  | 4.47                     |
| Kab. Rembang      | 3,379,995                      | 3,491,053  | 3,636,670  | 3,781,763  | 3,922,455  | 3.79                     |
| Kab. Pati         | 3,240,892                      | 3,396,703  | 3,552,462  | 3,707,476  | 3,869,888  | 4.53                     |
| Kab. Kudus        | 14,253,848                     | 14,510,594 | 14,859,825 | 15,226,547 | 15,749,881 | 2.53                     |
| Kab. Jepara       | 3,364,202                      | 3,467,372  | 3,566,052  | 3,687,309  | 3,827,325  | 3.28                     |
| Kab. Demak        | 2,529,308                      | 2,611,077  | 2,695,119  | 2,781,726  | 2,876,335  | 3.27                     |
| Kab. Semarang     | 5,229,810                      | 5,410,191  | 5,573,832  | 5,750,000  | 5,989,921  | 3.45                     |
| Kab. Temanggung   | 2,969,024                      | 3,058,053  | 3,135,698  | 3,233,211  | 3,349,106  | 3.06                     |
| Kab. Kendal       | 4,798,146                      | 4,930,585  | 5,065,556  | 5,270,495  | 5,545,075  | 3.69                     |
| Kab. Batang       | 2,995,518                      | 3,082,849  | 3,178,990  | 3,280,706  | 3,419,833  | 3.37                     |
| Kab. Pekalongan   | 3,239,700                      | 3,357,724  | 3,487,396  | 3,606,741  | 3,734,597  | 3.62                     |
| Kab. Pemalang     | 2,134,111                      | 2,202,651  | 2,285,280  | 2,366,919  | 2,466,564  | 3.69                     |
| Kab. Tegal        | 2,103,946                      | 2,212,591  | 2,321,422  | 2,435,800  | 2,535,659  | 4.78                     |
| Kab. Brebes       | 2,581,738                      | 2,685,422  | 2,794,524  | 2,913,948  | 3,036,783  | 4.14                     |
| Kota Magelang     | 6,933,010                      | 7,157,812  | 7,382,797  | 7,622,124  | 8,032,523  | 3.75                     |
| Kota Surakarta    | 7,942,735                      | 8,316,547  | 8,699,634  | 9,121,279  | 9,595,585  | 4.84                     |
| Kota Salatiga     | 4,398,945                      | 4,537,407  | 4,663,212  | 4,771,289  | 4,975,543  | 3.13                     |
| Kota Semarang     | 11,676,929                     | 12,187,352 | 12,676,256 | 13,158,220 | 13,834,186 | 4.33                     |
| Kota Pekalongan   | 6,460,858                      | 6,658,330  | 6,858,912  | 7,139,416  | 7,480,577  | 3.73                     |
| Kota Tegal        | 4,409,180                      | 4,625,357  | 4,850,637  | 5,081,935  | 5,279,047  | 4.61                     |

Sumber : BPS

Berdasarkan data BPS, pendapatan perkapita penduduk Provinsi Jawa Tengah selalu meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan 2-5% per tahunnya. Berdasar gambaran (Tabel 1.4), pendapatan perkapita penduduk Provinsi Jawa Tengah terbesar terdapat pada Kabupaten Kudus dan Kota Semarang dengan nilai pendapatan terakhir (2010) sebesar Rp 15.749.881 dan Rp 13.834.186. Pendapatan perkapita terendah ditempati Kabupaten Kebumen dengan jumlah pendapatan perkapita sebesar Rp2.392.844 (2010).

Pendapatan riil memang sangat penting, tetapi untuk melakukan perubahan dalam banyak hal yang berkaitan dengan peningkatan standar hidup, jelas membutuhkan peranan faktor lainnya. Faktor lain yang dimaksud adalah pendidikan dan kesehatan. Amartya Sen (dikutip oleh Todaro dan Smith, 2006), membantu memperjelas mengapa para ahli ekonomi pembangunan telah menempatkan penekanan yang begitu jelas terhadap kesehatan dan pendidikan, dan menyebut negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi tetapi memiliki standar pendidikan dan kesehatan yang rendah sebagai kasus "pertumbuhan tanpa pembangunan".

Dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2006) bahwa kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Dari Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah masyarakat Provinsi Jateng tahun 2006-2010, cenderung mengalami kenaikan di setiap tahunnya.

**Tabel 1.5**  
**Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, dan Rata-Rata Lama Sekolah Masyarakat Provinsi Jateng Tahun 2006-2011**

| <b>Tahun</b> | <b>Angka Harapan Hidup (tahun)</b> | <b>Angka Melek Huruf (%)</b> | <b>Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)</b> |
|--------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 2006         | 70,80                              | 88,24                        | 6,80                                  |
| 2007         | 70,90                              | 88,62                        | 6,80                                  |
| 2008         | 71,10                              | 89,24                        | 6,86                                  |
| 2009         | 71,25                              | 89,46                        | 7,07                                  |
| 2010         | 71,40                              | 89,95                        | 7,20                                  |
| 2011         | 71,55                              | 90,34                        | 7,20                                  |

Sumber : BPS

Akan tetapi untuk posisi angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dienyam oleh masyarakat, posisi Provinsi Jawa Tengah masih berada dibawah provinsi lainnya di Pulau Jawa (Tabel 1.6). Dalam Tabel 1.6, angka harapan hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah memang lebih baik dibanding beberapa wilayah lainnya di Pulau Jawa. Akan tetapi tingkat pendidikan masyarakat Provinsi Jawa Tengah, yang dilihat dari rata-rata lama sekolah maupun angka melek huruf masyarakat masih tergolong rendah.

**Tabel 1.6**  
**Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Angka Rata – Rata Lama Sekolah Masyarakat Antar Provinsi di Pulau Jawa**

| PROVINSI           | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) |       | Angka Melek Huruf (%) |       | Angka Harapan Hidup (Tahun) |       |
|--------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------------|-------|
|                    | 2010                           | 2011  | 2010                  | 2011  | 2010                        | 2011  |
| <b>DKI Jakarta</b> | 10.40                          | 10.40 | 99.13                 | 98.83 | 73.20                       | 73.35 |
| <b>Jawa Barat</b>  | 8.00                           | 7.90  | 96.18                 | 95.96 | 68.20                       | 68.40 |
| <b>Jawa Tengah</b> | 7.20                           | 7.20  | 89.95                 | 90.34 | 71.40                       | 71.55 |
| <b>DIY</b>         | 9.10                           | 9.10  | 90.84                 | 91.49 | 73.22                       | 73.27 |
| <b>Jawa Timur</b>  | 7.20                           | 7.30  | 88.34                 | 88.52 | 69.60                       | 69.86 |
| <b>Banten</b>      | 8.30                           | 8.40  | 96.20                 | 96.25 | 64.90                       | 65.05 |

Sumber : BPS

Berdasarkan dari teori kemiskinan Nurkse, modal fisik (pendapatan) dan modal manusia merupakan faktor-faktor utama yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan kemiskinan. Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka konsep pembangunan manusia adalah kondisi yang sebaliknya. Hubungan yang berkebalikan tersebut mengisyaratkan bahwa suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah (IPM, 2007).

Berdasarkan uraian latar belakang, teramat disayangkan apabila perkembangan kesejahteraan sosial hanya didasarkan pada modal fisik saja (pendapatan) dan kurang memperhatikan modal manusia. Jika demikian, maka kondisi ini dapat disebut sebagai kasus “pertumbuhan tanpa pembangunan”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan salah satu isi target MDGs, persoalan kemiskinan telah menjadi target utama pembangunan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah khususnya. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk miskin terbesar dibanding wilayah lainnya di Indonesia maupun Pulau Jawa. Data terakhir dari BPS Indonesia menyebutkan bahwa pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah berjumlah  $\pm 5,25$  juta jiwa. Jumlah penduduk miskin ini relatif lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur. Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dimana terlihat selama kurun waktu 5 tahun (2006-2010) jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Timur jauh lebih besar dari Jawa Tengah. Akan tetapi pada tahun 2011, penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur menurun jumlahnya dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah.

Kenyataan ini berkaitan dengan realisasi target perencanaan penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang telah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang mana seharusnya pada tahun 2011 target penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah bisa mencapai 15-16%, ternyata realisasinya belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan (Tabel 1.3). Tentunya hal ini memperlihatkan bahwa dukungan pemerintah terhadap program-program penanggulangan kemiskinan masih kurang optimal memberikan hasil. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk mencari tahu

secara lebih cermat hal-hal yang menyebabkan target yang ingin dicapai tidak dapat tepat sasaran.

Berdasarkan dari teori kemiskinan Nurkse, Baldwin dan Meier, modal fisik (pendapatan) dan modal manusia merupakan faktor-faktor yang memiliki hubungan erat dengan permasalahan kemiskinan. Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka konsep pembangunan manusia adalah kondisi yang sebaliknya. Jika pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Tsaniyah (2010) variabel pendapatan perkapita dan angka harapan hidup memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, maka berdasar dari uraian latar belakang pertanyaan penelitian yang dapat diajukan ada dua. Pertanyaan pertama mengenai apa sajakah variabel pembangunan selain kesehatan dan pendapatan yang dapat mempengaruhi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan rencana target penurunan kemiskinan tahun 2012 yang tertulis dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta proyeksi kemiskinan hingga 5 tahun kedepan.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menguji pengaruh variabel pendidikan (Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah), kesehatan (Harapan Hidup) dan

pendapatan (PDRB Perkapita) terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

2. Menghitung proyeksi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 sampai dengan 2017

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat berguna sebagai:

- a) Sebagai tolak ukur bagi perencanaan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- b) Sebagai aplikasi ilmiah untuk mengetahui dan membuktikan teori-teori yang berkenaan dengan materi penelitian ini
- c) Sebagai wadah bagi penulis untuk mempraktekan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan
- d) Diharapkan materi dari penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah informasi / referensi yang berguna bagi ilmu pengetahuan dan para pembaca yang berminat meneliti perihal yang sama.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil – hasil penelitian sebelumnya.

Dalam bab ini juga mengungkapkan kerangka pemikiran dan hipotesis.

**Bab III : Metode Penelitian**

Pada bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

**Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi pemaparan dari deskripsi obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

**Bab V : Penutup**

Pada bab terakhir ini disampaikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Definisi Kemiskinan**

Secara harfiah kata “miskin“ dapat diartikan sebagai “serba kekurangan”, sementara “kemiskinan” dipandang sebagai sebuah kondisi / keadaan serba kekurangan baik dalam bentuk fisik maupun materi. Dalam arti sempit, kemiskinan dapat dipahami sebagai sebuah keadaan serba kekurangan untuk menjamin keberlangsungan hidup. Dalam arti yang lebih luas, menurut Chambers (dalam Nita Angraini, 2012) kemiskinan adalah suatu konsep yang terintegrasi dengan lima dimensi yaitu: 1) kemiskinan, 2) ketidakberdayaan, 3) kerentanan menghadapi situasi darurat, 4) ketergantungan, dan 5) keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis.

Definisi dan kriteria kemiskinan sangat beragam dan untuk melihatnya bergantung pada sudut pandang seseorang. Begitu pentingnya mengentaskan kemiskinan, membuat berbagai institusi baik dari dalam maupun luar negeri berlomba-lomba mengartikan definisi kemiskinan. Oleh karenanya untuk lebih memahami, berikut beberapa contoh definisi yang terkumpul dari sejumlah literatur yang ada.

Definisi kemiskinan menurut Mubyarto (2004), digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau minimum yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Menurut pendapat Edi

Suharto (2009), pengertian kemiskinan hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat dalam memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Sumber lain yakni World Bank, mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dari segi kesejahteraan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan bermartabat. Definisi kemiskinan yang berasal dari Bappenas (2004) melihat kemiskinan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Berdasar dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan identik dengan permasalahan kesejahteraan dan standar tingkat hidup yang rendah, yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar hidup pada umumnya. Pada dasarnya meskipun definisi kemiskinan bermacam-macam, namun secara garis besar kemiskinan selalu berkaitan dengan masalah kesejahteraan dan tidak tercukupinya kebutuhan terhadap hak-hak dasar untuk bertahan hidup. Hak – hak dasar itu antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial - politik (BPS, 2009).

Permasalahan kemiskinan kini telah mengalami perluasan tidak hanya dalam hal definisi namun juga kriteria dan indikatornya. Cakupan penggambaran

kemiskinanpun tidak lagi hanya dari dimensi ekonomi, namun telah meluas ke berbagai dimensi lain. Oleh karenanya kemiskinan seringkali dikatakan sebagai permasalahan yang memiliki ciri-ciri sifat multidimensional.

Menurut Pantjar Simatupang (dalam Ravi, 2010), sifat kemiskinan yang multidimensi disebabkan karena kebutuhan manusia itu beragam, maka kemiskinanpun memiliki beragam aspek. Aspek tersebut bisa meliputi aspek primer berupa miskin asset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Jika demikian maka dimensi kemiskinan tidak hanya satu, melainkan multidimensi. Artinya dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung, dan jika terjadi kemajuan atau kemunduran maka akan mempengaruhi perkembangan aspek atau dimensi lainnya.

### **2.1.2 Ciri Kemiskinan**

Kemiskinan secara umum digambarkan dalam suatu keadaan dimana seseorang itu kekurangan bahan - bahan keperluan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dengan layak. Dalam kehidupan masyarakat modern kemiskinan biasanya disamakan dengan permasalahan kekurangan keuangan. Oleh karenanya meskipun banyak dimensi digunakan untuk menggambarkan kemiskinan, namun dari sekian banyak dimensi penggambaran itu, dimensi yang paling sering digunakan adalah dimensi ekonomi.

Dimensi ekonomi dianggap dapat mewakili suatu kondisi fisik nyata dari masyarakat miskin, karena dimensi ini berkaitan dengan konsep pemenuhan kebutuhan dasar yang mana segalanya diukur dengan uang. Salah satu contoh ciri umum kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana dasar lingkungan yang memadai. Keterbatasan akses tersebut dapat dilihat dari kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian masyarakat yang tidak menentu. Secara tidak langsung, semua permasalahan kemiskinan yang menimpa masyarakat miskin bersumber dari masalah keuangan / ketersediaan modal yang dimiliki masing-masing individu.

Untuk mengetahui gambaran dan ciri dari kondisi yang disebut miskin, diperlukan adanya suatu indikator. Peneliti biasanya menggunakan indikator untuk memudahkan memberi petunjuk dan kejelasan dari sebuah permasalahan yang sedang dibahas. Kerumitan penggambaran kemiskinan yang disebabkan karena banyaknya dimensi yang dapat digunakan menggambarkan kemiskinan, menyulitkannya untuk mempelajari ciri dan sebab dari permasalahan tersebut. Oleh karenanya perlu digali lebih dalam lagi melalui sumber-sumber literatur yang ada untuk mengetahui apa saja karakteristik atau kriteria rumah tangga miskin.

Karakteristik rumah tangga yang disebut miskin menurut BKKBN meliputi mereka yang tidak melaksanakan agama menurut agamanya, setiap anggota keluarga tidak mampu makan 2x sehari, setiap anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja / sekolah dan bepergian, bagian

terluas dari rumahnya berlantai tanah, sertas tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan. Adapun Badan Pusat Statistik telah menetapkan 14 kriteria rumah tangga yang masuk kategori miskin, seperti tertulis dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2008), yaitu sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum bersumber dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak bersekolah/tidak tamat SD/ hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti sepeda motor (kredit / non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya

Sementara itu ciri-ciri kemiskinan menurut rumah tangga miskin di Indonesia berdasarkan penelitian Tjiptohedjanto seperti dikutip dalam Patimah (2007), adalah sebagai berikut :

1. Pada umumnya memiliki jumlah anggota rumah tangga yang besar
2. Kepala rumah tangga merupakan pekerja rumah tangga
3. Tingkat pendidikan kepala dan anggota rumah tangga rendah
4. Sering berubah pekerjaan
5. Sebagian besar dari mereka yang telah bekerja namun masih menerima tambahan pekerjaan lain bila ditawarkan
6. Sumber penghasilan utama biasanya di sektor pertanian

### **2.1.3 Indikator Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki konsep yang beragam, sehingga dalam penentuan ukuran kemiskinanpun ikut beragam. Beberapa indikator ukuran kemiskinan telah banyak beredar di masyarakat. Salah satunya adalah indikator dari Bappenas.

Menurut Bappenas (2006), indikator ukuran miskin meliputi terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan penguasaan tanah, dan sebagainya.

Adanya keberagaman ukuran indikator kemiskinan inilah yang menyulitkan penafsiran mengenai permasalahan kemiskinan. Oleh karenanya untuk memberi kemudahan dalam penafsiran ukuran, maka setiap negara menetapkan sebuah batasan pengukuran kemiskinannya masing-masing. Batasan ukuran itu dikenal sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan garis batas kebutuhan minimum, untuk mengkategorikan seseorang dianggap miskin atau tidak. Garis kemiskinan berfungsi mewakili ciri-ciri warga miskin yang biasanya pengukuran tersebut didasarkan pada ukuran pendapatan atau pengeluaran dari seseorang.

Pengukuran garis kemiskinan berbeda-beda pada tiap negara, sehingga tidak ada satupun garis kemiskinan yang berlaku secara umum. Perbedaan pengukuran garis kemiskinan disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup pada masing - masing negara (Prima Sukma, 2011). Penentuan garis kemiskinan dengan menggunakan ukuran tingkat pendapatan digunakan oleh asosiasi World Bank. Menurut World Bank, kategori miskin ditentukan oleh perolehan pendapatan per hari seseorang. Kategorinya adalah jika pendapatan orang tersebut per harinya dibawah US\$ 1,25 - 2 per hari, maka orang itu dapat dikatakan dalam kondisi miskin.

Ukuran kemiskinan dengan menggunakan konsumsi beras perkapita digunakan oleh Sajogyo (1977) untuk mengukur kemiskinan. Untuk konsumsi beras perkapita daerah perkotaan, ukuran konsumsi beras penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 360 kg perkapita pertahunbisa digolongkan miskin. Untuk daerah perdesaan, ukurannya adalah kurang dari 240 kg perkapita pertahun

Di Indonesia ukuran kemiskinan yang digunakan umumnya mengacu pada ukuran kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS (2010) penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Ukuran pengeluaran perkapita yang dikeluarkan oleh BPS ini mencakup pengeluaran konsumsi baik untuk makanan maupun non makanan per bulannya. Garis kemiskinan (GK) yang digunakan oleh BPS, merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) ini senilai jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk, yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi – komoditi non makanan terpilih yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Ukuran kemiskinan lainnya adalah pengukuran kemiskinan yang digunakan pada publikasi UN (1961) yang berjudul *International Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide* menggunakan indikator kesejahteraan rakyat. Dalam publikasi UN tersebut terdapat 9 komponen kesejahteraan yang disarankan yaitu kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja,

perumahan, jaminan sosial, sandang, konsumsi makanan dan gizi, rekreasi dan kebebasan (Nita Anggraini, 2012).

Sebagaimana ciri dari rumah tangga miskin dan beberapa indikator kemiskinan yang telah dijelaskan sebelumnya, kemiskinanpun dibedakan dan dikelompokkan kedalam beberapa kategori yang ada, yaitu sebagai berikut :

A. Kategori kemiskinan yang didasarkan dari jenisnya kemiskinannya

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang biasanya berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan yang lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Kategori kemiskinan selain dilihat dari jenisnya dapat pula dibedakan berdasarkan penyebab dan ukurannya. Menurut Paul Spicker (2002), dalam Ravi (2010), kemiskinan berdasarkan jenis penyebabnya dibedakan kedalam 4 mazhab.

B. Kategori kemiskinan yang terbagi berdasarkan penyebabnya

1. Individual Explanation, kemiskinan yang disebabkan atau yang diakibatkan oleh karakteristik orang itu sendiri, seperti malas, pilihan yang salah, gagal dalam bekerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak dan sebagainya.

2. Familial Explanation, kemiskinan jenis ini umumnya diakibatkan oleh faktor keturunan, dimana antar generasi terjadi ketidakberuntungan yang berulang, terutama akibat pendidikan.
3. Subcultural Explanation, kemiskinan subkultural biasanya diakibatkan oleh adanya karakteristik perilaku suatu lingkungan yang berakibat pada moral dari masyarakat.
4. Structural Explanation, kemiskinan jenis ini menganggap kemiskinan sebagai produk dari masyarakat yang menciptakan ketidakseimbangan dengan pembedaan status atau hak.

C. Kategori kemiskinan yang dibedakan berdasarkan ukuran :

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang yang termasuk golongan miskin absolut apabila dilihat dari pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak mencukupi untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep dari kemiskinan yang menggunakan pengukuran ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup guna memenuhi kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang yang dikatakan termasuk golongan miskin relatif didasari dari apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Berdasar dari konsep ini, maka garis kemiskinan akan

mengalami perubahan apabila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis dan akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial yang mana semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan bawah, maka semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan selalu miskin.

#### **2.1.4 Teori Kemiskinan**

Persoalan kemiskinan sering disebut sebagai lingkaran setan yang tidak berujung pangkal. Secara harfiah, sebuah lingkaran dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian yang saling terhubung satu sama lain. Jadi konsep lingkaran kemiskinan dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk rangkaian sebab akibat yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kemiskinan.

Berkonsep pada sebuah lingkaran, permasalahan kemiskinan dapat muncul disebabkan karena beragam macam alasan, baik disebabkan karena faktor alam, struktur dalam masyarakat atau individu itu sendiri. Penyebab kemiskinanpun mengalami perluasan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini.

Beberapa pendapat mengenai penyebab kemiskinanpun turut bermunculan melalui sejumlah penelitian yang ada. Menurut Sharp (dalam Mudrajat Kuncoro, 2006), terdapat 3 faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari segi ekonomi. Penyebab pertama muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk

miskin umumnya hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Penyebab kedua muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upah turut rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya ini disebabkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau keturunan. Penyebab terakhir muncul karena adanya perbedaan akses dalam modal.

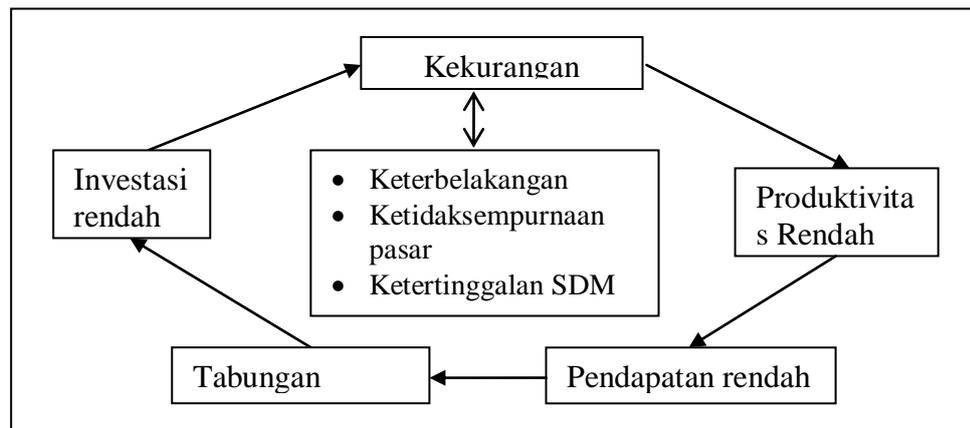
Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Kesempatan berusaha yang ada di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

Berdasar dari ringkasan definisi, ciri, dan penyebabnya, permasalahan kemiskinan sejatinya adalah permasalahan yang menyangkut soal kesejahteraan hidup seseorang. Jika komponen pengukur kesejahteraan telah terpenuhi sebagian

atau seluruhnya, bisa dikatakan orang tersebut terbebas dari jerat kemiskinan, begitu juga sebaliknya.

Berkonsep pada teori lingkaran kemiskinan, munculnya permasalahan kemiskinan disebabkan karena adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal. Ketiga sentral permasalahan kemiskinan inilah yang menghambat peningkatan dan pencapaian kesejahteraan seseorang. Selain menghambat peningkatan kesejahteraan seseorang, ketiga sentral permasalahan kemiskinan ini juga menimbulkan permasalahan seperti produktivitas kerja yang rendah dan dampak negatif lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

**Gambar 2.1**  
**Lingkaran Kemiskinan Baldwin dan Meier**

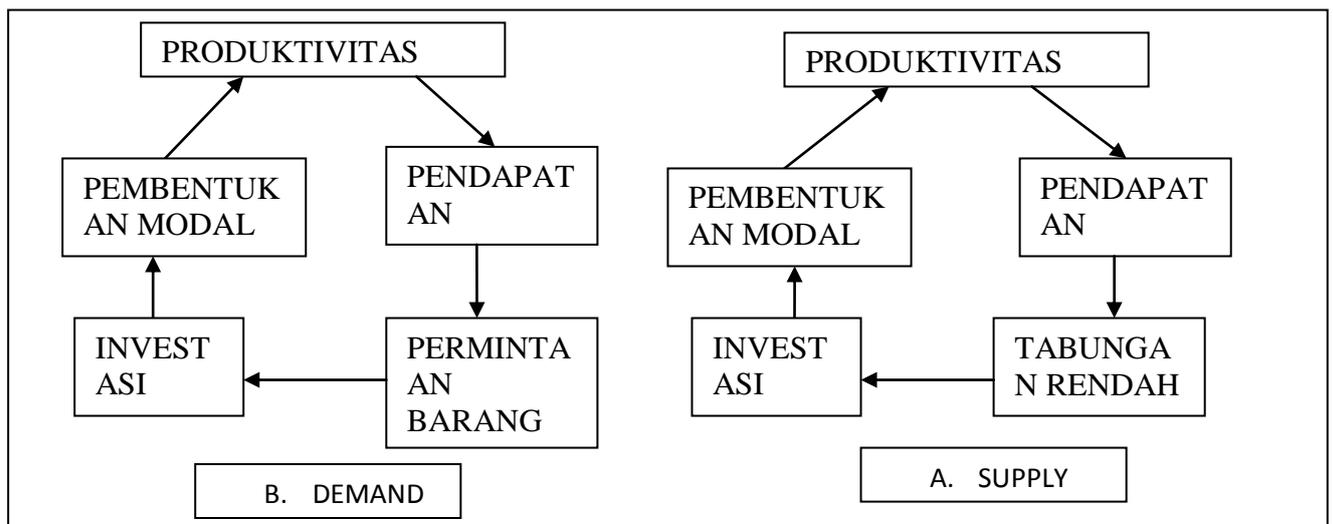


Sumber : Todaro, 2000

Berawal dari implikasi rendahnya produktivitas kerja inilah kemudian akan berlanjut pada rendahnya pendapatan yang dapat diterima, sehingga menyebabkan tabungan dan investasi yang dimiliki juga rendah, baik investasi manusia maupun kapital. Dampaknya tentu akan berputar kembali pada masalah keterbelakangan dan kekurangan modal, yang mana pada akhirnya permasalahan kemiskinan hanya berputar tanpa adanya penyelesaian.

Sedikit berbeda dengan teori lingkaran kemiskinan Baldwin dan Meier, teori dari Nurkse melihat siklus kemiskinan kedalam 2 segi yaitu permintaan dan penawaran. Teori lingkaran kemiskinan dari segi penawaran, melihat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah sehingga menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan menabung rendah menyebabkan tingkat pembentukan modal (investasi) menjadi rendah dan menyebabkan individu tersebut mengalami kekurangan modal. Akibat dari kekurangan modal, individu tersebut tidak mampu untuk meningkatkan produktivitasnya, begitu seterusnya. Dari segi permintaan, di negara-negara yang miskin, perangsang untuk menanamkan modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Keterbatasan itu diakibatkan karena pendapatan masyarakat rendah, sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu.

**Gambar 2.2**  
**Teori Lingkaran Kemiskinan Nurkse**



Sumber : Suryana, 2000

Berdasar dari beberapa penyebab kemiskinan baik yang dilihat dari kondisi lapangan maupun teori kemiskinan, penyebab produktivitas rendah disebabkan karena adanya keterbatasan dalam hal modal. Keterbatasan dalam modal manusia dan fisik inilah yang menciptakan kondisi keterbelakangan sehingga menyebabkan produktivitas seseorang menjadi rendah.

Keterbatasan modal bisa terjadi karena ketertinggalan kualitas SDM dan kurangnya daya dukung dari pasar dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Oleh karenanya, untuk mengatasi keterbatasan modal yang dimiliki, maka penghambat yang menjadi penyebab keterbatasan modal tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu. Untuk usaha pertama yang diperlukan adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan modal manusia. Perbaikan terhadap modal manusia dapat ditempuh melalui perbaikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan merupakan salah satu indikator komposit yang banyak digunakan untuk meningkatkan modal manusia. Modal manusia yang rendah menyebabkan produktivitas kerja menjadi rendah dan berujung pada kemiskinan seseorang. Adanya indikator pendidikan dapat membantu meningkatkan modal manusia yang mampu berperan dalam mengatasi kemiskinan.

Dalam penelitian Hermanto dan Dwi (2007) pendidikan diketahui mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan variabel pembangunan lain seperti PDRB, tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Hubungan pendidikan dengan kemiskinan erat kaitannya dengan cara penyelamatan diri dari kemiskinan, seperti diungkapkan oleh Simmon didalam Todaro dan Smith (2006). Pendidikan menjadi cara penyelamatan dari kemiskinan dikarenakan pendidikan

menyediakan pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku guna meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kesempatan kerja (Wahyudi, 2011). Alasan lain kebutuhan mengenai pendidikan wajib untuk dipenuhi karena pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan kapasitas mutu pembangunan manusia.

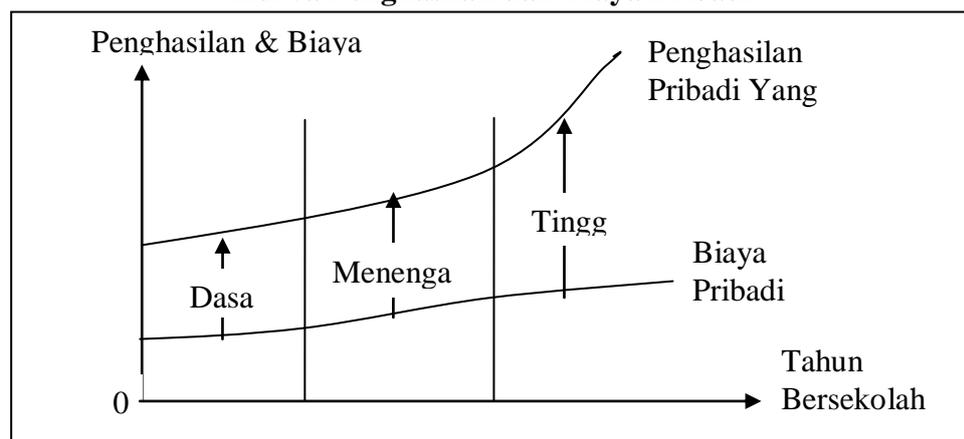
Pendidikan merupakan salah satu aset dasar kehidupan yang sama penting fungsi dan peranannya dengan aset-aset lainnya dalam upaya menunjang kebutuhan dan memperbaiki mutu hidup seseorang. Semakin meningkatnya mutu kualitas pembangunan manusia, menunjukkan semakin tingginya daya saing dan kemampuan produktivitas manusia dalam upaya memperbaiki standar hidupnya.

Kewajiban mengenyam pendidikan telah tertulis sejak lama dalam amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. Dimana ayat (1) berbunyi “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat (2) berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Kewajiban yang sama tersebut tertulis pula dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Artinya negara berkewajiban mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Oleh karenanya semua masyarakat baik yang mampu ataupun kurang mampu wajib mengikuti pendidikan dasar, tanpa perlu khawatir tidak memiliki biaya karena sepenuhnya kewajiban tersebut ditanggung oleh pemerintah.

Menurut pendapat Tobing (dalam Hastarini, 2005), orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik

dibanding dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Hal itu didasari dari semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani, maka semakin tinggi pula kesempatan mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Implikasi dari semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka semakin makmur kehidupan penduduk tersebut. Untuk menjelaskan mekanisme peran pendidikan kaitannya antara biaya pribadi yang dikeluarkan selama menempuh jenjang pendidikan dengan perolehan penghasilan yang diharapkan setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi ( Gambar 2.3 ).

**Gambar 2.3**  
**Kurva Penghasilan dan Biaya Pribadi**



**Sumber : Todaro (2000)**

Menurut Todaro (2000), untuk dapat memaksimalkan selisih antara keuntungan yang diharapkan dengan biaya - biaya yang diperkirakan, maka strategi optimal bagi seseorang adalah berusaha menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin. Dimana investasi modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya ketika nantinya mereka sudah siap bekerja penuh. Asumsi yang berlaku adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik dalam pola pikir maupun polanya. Orang

yang memiliki pendidikan tinggi biasanya akan memulai kerja penuh ketika usia mereka telah cukup tua, dengan pertimbangan pendapatan mereka akan cepat naik dan lebih tinggi dari yang bekerja lebih awal.

Kesejahteraan maupun kemakmuran selain diukur dari pendidikan juga bisa dilihat dari umur hidupnya. Dalam konteks pembangunan manusia, ukuran harapan hidup digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari sisi kesehatan. Di negara - negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Oleh karenanya Lincoln (1999) menjelaskan bahwa intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi (Merna, 2011).

Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam investasi pembangunan manusia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang agar dapat terlepas dari belenggu kemiskinan. Jika kemiskinan merupakan penghambat bagi majunya perkembangan hidup seseorang, karena mempersempit pilihan atau kesempatan yang dimiliki untuk berkembang, maka sebaliknya dengan pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia memperluas pilihan manusia terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti

kesehatan dan pendidikan. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah (Merna, 2011).

### **2.1.5 Pertumbuhan dan Kemiskinan**

Pertumbuhan dan kemiskinan merupakan satu kesatuan dalam sebuah siklus pembangunan. Pertumbuhan yang tinggi dan kemiskinan yang rendah menjadi harapan untuk keberhasilan dari sebuah pembangunan. Akan tetapi selama masa tumbuh pembangunan, permasalahan kemiskinan akan selalu mengikuti hingga pertumbuhan pembangunan mencapai tahap akhir. Hal itu menurut Kuznet (Tulus Tambunan, 2001) disebabkan karena kemiskinan memiliki korelasi yang kuat dengan pertumbuhan. Korelasi tersebut terlihat pada tahap awal proses pembangunan, dimana tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur - angsur berkurang.

Jika demikian sesuai dengan penelitian Siregar (2006), maka pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan, dan syarat kecukupannya adalah pertumbuhan tersebut haruslah efektif mengurangi kemiskinan. Dalam Laporan Monitoring Global (Bank Dunia, 2005) juga dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memainkan peranan sentral dalam upaya menurunkan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan global.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur prestasi perekonomian suatu negara dan menilai apakah

pembangunan yang dijalankan berhasil ataukah tidak. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan ukuran pendapatan. Ukuran pertumbuhan ekonomi yang lazim digunakan umumnya menggunakan ukuran PDRB. PDRB biasa digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan suatu daerah secara umum / luas, sehingga untuk mengetahui perkembangan pendapatan penduduk lebih riil biasanya menggunakan ukuran PDRB perkapita.

PDRB perkapita adalah perhitungan PDRB yang telah dibagi dengan jumlah penduduk suatu daerah. Penggunaan ukuran PDRB ini biasanya digunakan untuk melihat perkembangan pendapatan penduduk secara riil dan kontinyu. Pendapatan dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai hasil berupa uang atau materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas. Konsep pendapatan juga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang, yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Samuelson dan Nordhaus, 2002).

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik digambarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional yang merupakan fungsi dari faktor produksi dan fungsi produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka merepresentasikan distribusi pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan (Merna, 2011). Dalam hal ini, ketika perekonomian berkembang atau mengalami pertumbuhan di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil), berarti terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan.

Pendapatan yang dibelanjakan lebih banyak berarti secara ekonomis kemampuan ekonominya telah meningkat. Dimana jika terdistribusi dengan baik di antara penduduk di kawasan tersebut, maka secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pengurangan terhadap jumlah penduduk miskin. Satu hal yang perlu diingat bahwa pengurangan kemiskinan akibat adanya pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan efek dari perubahan distribusi pendapatan yang terjadi. Oleh karena itu peran pendapatan dalam mempengaruhi kemiskinan, sedikit banyak memerlukan peranan dari sebuah distribusi yang baik.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian mengenai kemiskinan telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan daerah, periode waktu dan spesifikasi penelitian yang berbeda-beda. Untuk melengkapi dukungan dari landasan teori, maka penelitian ini juga dilengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

1. **Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2005)**, dalam jurnal “ **Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia : Pendekatan Model Computable General Equilibrium (CGE), dan Foster-Greer-Thorbecke Method** “. Variabel yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, investasi pendidikan, dan investasi kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah investasi sumberdaya manusia berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan

ekonomi. Investasi kesehatan dan pendidikan sama-sama dapat mengurangi kemiskinan, namun investasi kesehatan memiliki persentase yang lebih besar.

2. **Aprilliyah Napitupulu (2007)** dengan jurnal “ **Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara** ”. Penelitian ini menggunakan metode “ Ordinary LeastSquare “, sementara data yang digunakan berupa data time series dari tahun 1990 s/d 2004. Model yang digunakan :

$$Y = a_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + u$$

Dimana ;

Y : jumlah penduduk miskin Sumatera Utara (jiwa)

X1: angka harapan hidup (tahun)

X2: angka melek huruf (persen)

X3: konsumsi perkapita (rupiah)

Hasil dari penelitian Apriliyah menemukan bahwa variabel angka harapan hidup, angka melek huruf dan konsumsi perkapita berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

3. Penelitian **Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto (2010)**, yang berjudul “**Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia**” . Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB dan IPM seluruh provinsi di Indonesia tahun 2006 – 2008. Untuk metode analisis, penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan model FEM dan REM.

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X1_{it} + \beta_2 \ln X2_{it} + e_{it}$$

dimana  $Y$  = kemiskinan;  $X_1$  = PDRB ;  $X_2$  = IPM;  $i$  = daerah dan  $t$  = waktu.

Hasil penelitian mendapati bahwa pengaruh IPM dalam mempengaruhi kemiskinan jauh lebih besar dari pengaruh PDRB. Dari hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum pro orang miskin.

4. **Nur Tsaniyah (2010)**. Dalam penelitian “ **Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus : 30 Provinsi)** “. Metode analisis yang digunakan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi model Least Square Dummy Variabel (LSDV). Model penelitian yang digunakan :

$$KMSKN_{it} = a_{0i} + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 AHH_{it} + U_i$$

Dimana;

KMSKN : tingkat kemiskinan provinsi

PDRB : PDRB perkapita

AHH : angka harapan hidup

Dari hasil penelitian, variabel PDRB perkapita dan variabel angka harapan hidup berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kemiskinan adalah persoalan yang rumit dan selalu hadir dalam setiap proses pembangunan. Permasalahan kemiskinan pada umumnya berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan hidup layak yang mampu diwujudkan oleh setiap individu masyarakat. Kesejahteraan adalah kondisi dimana segala kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup telah terpenuhi sebagian atau bahkan seluruhnya,

sedangkan kemiskinan menggambarkan kondisi yang sebaliknya. Umumnya ukuran yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan hidup telah terpenuhi atau belum, biasanya diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar hidup atau hak-hak hidup seseorang. Hak-hak dasar itu antara lain seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan kemiskinan yang umumnya dihadapi penduduk miskin adalah tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Permasalahan itu disebabkan karena keterbatasan modal yang dimiliki penduduk miskin. Keterbatasan modal yang dialami penduduk miskin tidak hanya dalam hal modal fisik namun modal manusia juga. Modal manusia biasanya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Pendidikan yang umumnya dienyam oleh penduduk miskin biasanya hanya sampai tingkat sekolah dasar saja. Dengan kepemilikan pengetahuan yang rendah tersebut, maka produktivitas yang dimilikipun menjadi ikut rendah.

Produktivitas yang rendah itupun biasanya diperparah dengan keterbatasan permodalan, yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah uang. Umumnya penduduk miskin memiliki kondisi keuangan yang sangat minim daripada orang kebanyakan. Hal ini disebabkan selain karena pendidikannya yang rendah, produktivitas yang dimilikipun sama rendahnya, sehingga untuk berharap memperoleh pendapatan yang tinggi itu merupakan sebuah mimpi besar. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, maka upaya utama yang perlu ditempuh adalah dengan memperbaiki produktivitas yang dimiliki oleh penduduk miskin tersebut. Perbaikan itu perlu dimulai dari perbaikan terhadap

modal manusia terlebih dahulu, kemudian modal fisik dan selanjutnya pada faktor – faktor yang mendukung upaya untuk mengatasi kemiskinan.

Pendidikan merupakan pilar bagi kemajuan bangsa dan negara. Oleh karenanya pendidikan menjadi sebuah hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Salah satu alasan yang menguatkan peran pendidikan begitu penting untuk diperhatikan adalah karena perannya yang mampu mempengaruhi kemiskinan. Menurut simmon (dikutip dari Todaro dan Smith, 2006) pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan.

Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan, peran pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan daya saing manusia agar mampu bersaing didalam pasar global. Menurut Mankiw (2003) suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya *ceteris paribus* akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumberdaya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, selain pendidikan. Tanpa adanya peran kesehatan, masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber

pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2006) bahwa kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

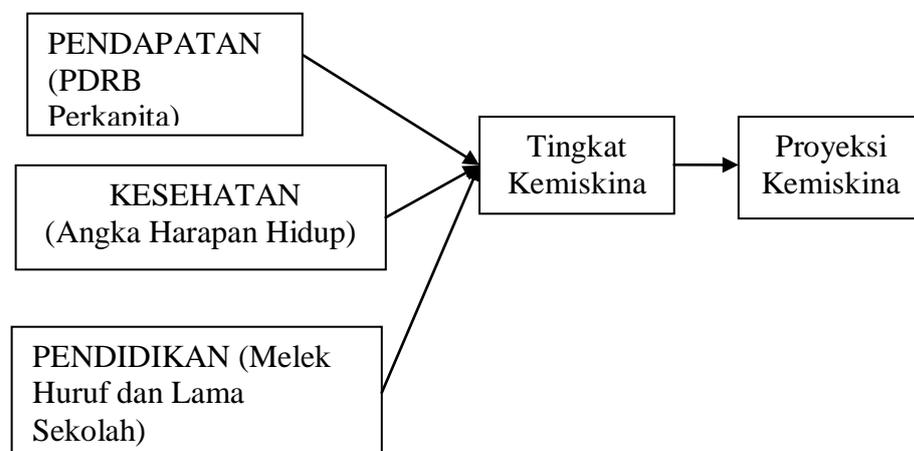
Peran yang sama dimiliki pula oleh pendapatan. Jika pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan peningkatan terhadap kualitas sumber daya manusianya, maka pendapatan berkaitan dengan peningkatan terhadap standar hidup. Dimana perannya saling melengkapi satu sama lain. Dalam hal ini, peran pendapatan dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan dapat terjadi ketika perekonomian berkembang atau mengalami pertumbuhan di suatu kawasan (negara atau kawasan tertentu yang lebih kecil). Yang mana berarti terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, dengan demikian daya beli seseorang akan meningkat.

Peranan pendapatan terhadap kemiskinan dapat terlihat pengaruhnya, apabila pendapatan tersebut telah terdistribusi dengan baik. Jika pendapatan telah

terdistribusi dengan baik di antara penduduk di kawasan tersebut, maka secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pengurangan terhadap jumlah penduduk miskin. Untuk selebihnya, jika perbaikan dalam pendidikan, kesehatan dan distribusi terhadap pendapatan telah dilakukan dengan baik, sesuai dengan teori kemiskinan maka produktivitas seseorang akan cenderung meningkat. Peningkatan produktivitas ini akan membantu peningkatan kualitas hidup dari rumah tangga keluarga miskin, sehingga tingkat kemiskinan rumah tangga tersebut akan semakin berkurang. Jika peningkatan tersebut berjalan secara berkelanjutan, maka kemiskinan dapat dipastikan hilang sepenuhnya dari rumah tangga itu.

Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan semua peran variabel-variabel tersebut sangat dibutuhkan karena merealisasikan pengaruh peningkatan terhadap standar hidup dan kemampuan daya saing manusia. Oleh karenanya dengan berlandaskan teori dan kajian penelitian – penelitian terdahulu, maka dapat disusunlah kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :

**Gambar 2.4**  
**Skema Kerangka Pemikiran Teoritis**



## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang dan kerangka pemikiran teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah sebagai berikut :

- a) Variabel pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
- b) Variabel kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
- c) Variabel pendidikan (angka melek huruf) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
- d) Variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan
- e) Diduga proyeksi kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 s/d 2017 mengalami penurunan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Sebuah penelitian sudah tentu membutuhkan definisi operasional. Definisi operasional berperan mempermudah pelaksanaan jalannya penelitian dan memperjelas variabel yang diteliti. Definisi operasional mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap objek atau fenomena yang diamati (A. Hidayat, 2007).

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pendapatan. Dari keempat variabel tersebut, masing-masing variabel dibedakan kedalam dua kelompok variabel yaitu dependen dan independen. Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini yang berperan sebagai dependen adalah variabel tingkat kemiskinan, dan variabel lain adalah variabel bebas. Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang memiliki sifat mempengaruhi atau yang menjadi sebab dari perubahan variabel dependen. Variabel bebas yang termasuk dalam penelitian ini adalah variabel pendidikan, kesehatan, pendapatan. Berikut definisi operasional masing-masing variabel dependen dan independen.

## 1. Variabel tingkat kemiskinan (dependen)

Kemiskinan adalah fenomena sosial dalam proses pembangunan, biasanya dialami sejumlah penduduk disuatu daerah dengan ciri tidak dapat memenuhi perhitungan kebutuhan dasar hidup yang telah ditetapkan oleh suatu badan yang berwenang. Singkatnya, standar perhitungan tersebut dikenal sebagai garis batas kemiskinan. Garis batas kemiskinan yang digunakan adalah dari yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data persentase penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Satuan ukur yang digunakan untuk pengukuran penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan ini menggunakan ukuran persentase.

## 2. Variabel independen

### a) Pendidikan

Variabel pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini diproxy dari data rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah diukur dari rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di masing-masing Kabupaten/Kota di suatu wilayah. Angka melek huruf diukur dari perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas, di masing-masing kabupaten/kota. Satuan ukur yang digunakan dalam variabel rata-rata lama sekolah ini dinyatakan dalam satuan tahun, sedangkan angka melek huruf menggunakan satuan persen.

#### b) Kesehatan

Variabel kesehatan dalam penelitian ini diproxy dari data angka harapan hidup masyarakat. Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $X$  pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya (BPS, 2010). Satuan ukur untuk data kesehatan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk satuan tahun.

#### c) Pendapatan

Variabel pendapatan dalam penelitian ini diproxy dari PDRB perkapita. PDRB perkapita diperoleh dari hasil Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang telah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Satuan ukur variabel yang digunakan adalah dalam bentuk rupiah.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka. Berdasarkan sumbernya, data kuantitatif termasuk dalam data sekunder. Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, namun dari informasi pihak lain dan berupa bahan tulisan yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deret waktu (time series) dengan data deret lintang (cross section). Untuk data deret waktu menggunakan data tahun 2006-2010, sedang data deret lintang menggunakan data obyek wilayah.

Pemilihan periode ini dipilih untuk pemutakhiran data terbaru dari penelitian-penelitian sejenis lainnya. Alasan lain yang mendasari terpilihnya periode ini karena target penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang tidak tercapai pada tahun 2011 membuat penelitian ini semakin menarik untuk diamati. Akan tetapi karena permasalahan ketersediaan data pada tahun 2011 tidak bisa terlengkapi untuk beberapa variabel yang digunakan maka pemilihan periode diputuskan hanya mengambil hingga tahun 2010 saja. Adapun sumber data diperoleh dari Jawa Tengah dalam angka terbitan Badan Pusat Statistik (BPS).

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan prosedur sistemik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan diperoleh dari berbagai sumber. Metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah metode pengumpulan informasi data melalui catatan, literatur, dokumentasi, dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya disusun dan diolah sesuai kepentingan dan tujuan penelitian. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2006-2010.

### **3.4 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif seperti data yang dapat diukur, diuji dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel

dan sebagainya. Dalam studi ini tahapan analisis kuantitatif meliputi estimasi model regresi, uji asumsi klasik dan statistik. Jika ketiga tahapan analisis tersebut telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah memproyeksikan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2012 s/d 2017.

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis panel data (pooled data) sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan software *eviews* 6. Analisis menggunakan panel data adalah kombinasi antara time series data dan cross section data (Gujarati, 2009). Alasan digunakannya metode data panel dalam penelitian ini adalah karena adanya permasalahan ketersediaan data yang ada. Beberapa data dari variabel yang digunakan dalam penelitian, tidak memiliki ketersediaan data untuk memenuhi kebutuhan data time series. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode data panel. Metode data panel dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

### **3.4.1 Metode Analisis Data Panel**

Metode analisis data panel pertama kali diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, dimana bentuk data yang digunakan merupakan gabungan data silang (cross section) dan runtut waktu (time series). Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek tetapi meliputi beberapa periode, sedang data silang terdiri atas beberapa atau banyak objek yang sering disebut sebagai responden (Wing Wahyu, 2009). Gujarati (2003) menyatakan bahwa untuk menggambarkan data cross section, nilai satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit

sampel pada suatu waktu. Dalam model panel data, unit cross section yang sama di survey dalam beberapa waktu.

Persamaan model menggunakan data cross section (Schohrul, 2011):

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \mu_i \dots\dots\dots (3.1)$$

$i = 1, 2, \dots$ , dst

Dimana  $i$  = jumlah cross section

Persamaan model data time series (Schohrul, 2011) :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \mu_t \dots\dots\dots (3.2)$$

$t = 1, 2, \dots$ , dst

Dimana  $t$  = jumlah time series

Mengingat bahwa data panel merupakan penggabungan model data time series dan cross section, maka bentuk persamaan matematis untuk regresi data panel adalah sebagai berikut (Schohrul, 2011) :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

$i = 1, 2, \dots$ dst , ;  $t = 1, 2, \dots$  ,dst

dimana,

$i$  : jumlah cross section

$t$  : jumlah time series

$i \times t$  : jumlah seluruh data panel

Apabila variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian, diaplikasikan pada bentuk model data panel ini, maka bentuk dari persamaannya menjadi :

$$POVERTY = f (INCOME, HEALTH, EDUCATION) \dots\dots\dots (3.4)$$

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 INC_{it} + \beta_2 HEAL_{it} + \beta_3 EDU_{(MH)it} + \beta_4 EDU_{(LS)it} + \mu_{it} \dots\dots\dots (3.5)$$

Dimana,

- POV : Tingkat Kemiskinan (%)
- INC : pendapatan perkapita (rupiah)
- HEAL : kesehatan / angka harapan hidup (tahun)
- EDU<sub>(MH)</sub> : angka melek huruf (%)
- EDU<sub>(LS)</sub> : rata-rata lama sekolah (tahun).
- i : cross section
- t : time series
- $\beta_0$  : konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : koefisien
- $\mu_{it}$  : komponen error waktu t untuk unit cross section i

Dalam sebuah penelitian, tentunya pernah mengalami masalah perbedaan satuan. Adanya perbedaan satuan dan besaran variabel dalam persamaan menyebabkan persamaan harus dibuat ke dalam bentuk model Semi-log. Dalam model ini variabel yang akan diubah menjadi logaritma adalah variabel pendidikan, kesehatan dan pendapatan, sehingga bentuk persamaannya adalah sebagai berikut :

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LogINC}_{it} + \beta_2 \text{LogHEAL}_{it} + \beta_3 \text{LogEDU}_{(MH)it} + \beta_4 \text{LogEDU}_{(LS)it} + \mu_{it} \dots \dots (3.6)$$

Alasan dalam pemilihan model logaritma ini ( Imam Gozali, 2005 ) adalah sebagai berikut :

- a) Menghindari adanya heteroskedastisitas
- b) Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas

c) Mendekatkan skala data

Metode analisis data panel banyak digunakan dalam setiap penelitian, karena pada dasarnya penggunaan metode data ini memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan metode data panel menurut Baltagi dalam (Gujarati, 2003) adalah sebagai berikut :

1. Panel data mampu mengkombinasikan data time series dan cross sectional, sehingga data yang diberikan lebih informatif, variatif, mengurangi kolinearitas antar variabel, derajat kebebasan lebih banyak, dan efisiensi yang lebih besar .
2. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel lebih baik untuk digunakan dalam mempelajari dinamika perubahan.
3. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dalam mengukur efek-efek yang tidak dapat di observasi dalam cross sectional maupun time series murni.
4. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.

Dalam model analisis regresi data panel terdapat 3 metode yang digunakan yaitu (Gujarati, 2003) :

1. Pooled Least Square (PLS)

Pendekatan Pooled Least Square merupakan pendekatan secara sederhana dari data panel yang menggabungkan seluruh data time series dan cross section. Pooled least square digunakan untuk mengestimasi data panel

dengan metode OLS. Bentuk persamaan model data panel untuk metode PLS adalah sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.7)$$

## 2. Fixed Effect (FE)

Model pendekatan fixed effect digunakan untuk memperhitungkan kemungkinan bahwa peneliti menghadapi masalah omitted-variabel, yang mungkin membawa perubahan pada intersep time series atau cross section. Oleh karenanya untuk mengatasi hal tersebut, dalam model data panel metode FE ini memasukkan variabel boneka (dummy). Variabel dummy dimasukkan ke dalam model ini untuk mengizinkan adanya perubahan intersep. Untuk model persamaan metode pendekatan FE adalah :

$$Y_{it} = a_1 + a_2 D_2 + \dots + a_n D_n + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.8)$$

## 3. Random Effect (RE)

Pendekatan RE memperbaiki efisiensi proses least square dengan memperhitungkan error dari cross section dan time series. Model RE adalah variasi dari estimasi generalized least square (GLS). Untuk model RE ini, bentuk persamaan regresinya adalah :

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.9)$$

Untuk memilih menggunakan salah satu dari 3 model pendekatan data panel tersebut, menurut Judge (Ravi, 2010), ada empat pertimbangan pokok yang harus diketahui terlebih dahulu :

- a) Apabila jumlah *time-series* (T) besar sedangkan jumlah *cross-section* (N) kecil, maka hasil *fixed effect* dan *random effect* tidak jauh berbeda sehingga

dapat dipilih pendekatan yang lebih mudah untuk dihitung yaitu *fixed effect model (FEM)*.

- b) Apabila N besar dan T kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan akan berbeda jauh. Jadi, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian diambil secara acak (*random*) maka *random effect* harus digunakan. Sebaliknya, apabila kita meyakini bahwa unit *cross-section* yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan *fixed effect*.
- c) Apabila komponen *error*  $\epsilon_i$  individual berkorelasi maka penaksir *random effect* akan bias dan penaksir *fixed effect* tidak bias.
- d) Apabila N besar dan T kecil, dan apabila asumsi yang mendasari *random effect* dapat terpenuhi, maka *random effect* lebih efisien dibandingkan *fixed effect*.

Untuk menguji penggunaan model pendekatan mana yang terbaik dari ketiga pendekatan yang ditawarkan dalam model panel data, maka dapat diuji dengan :

a. Uji F

Uji F adalah pengujian untuk menentukan model FE atau PLS yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis untuk uji chow adalah :

$H_0$  : Common effect model / Pooled Least Squared

$H_1$  : Fixed Effect Model

Dasar penolakan hipotesis uji F tersebut adalah dengan membandingkan hasil perhitungan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Apabila hasil menunjukkan  $F_{hitung} > F_{tabel}$

pada tingkat keyakinan ( $\alpha$ ) tertentu, maka keputusannya  $H_0$  ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect, begitupun sebaliknya.

Rumus perhitungan uji F (Shochrul dkk, 2011) :

$$F = \frac{\frac{(R^2_r - R^2_{ur})}{(m)}}{\frac{1 - R^2_{ur}}{(n-k)}} \dots\dots\dots (3.10)$$

Dimana,

$R^2_r$  :  $R^2$  model Common Effect

$R^2_{ur}$  :  $R^2$  model Fixed Effect

m : jumlah restricted variabel

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel independen

#### b. Uji Hausman

Dalam menentukan model mana yang lebih baik antara model fixed effect dan random effect untuk digunakan pada model persamaan data panel, maka langkah yang harus di tempuh adalah dengan melakukan uji Hausman. Uji Hausman ini menggunakan nilai dari distribusi chi-square dengan derajat bebas sebanyak jumlah variabel independen, sehingga keputusan pemilihan metode dapat dilakukan secara statistik.

Hipotesis untuk uji Hausman ini adalah

$H_0$  = random effect

$H_1$  = fixed effect

Apabila hasil yang diperoleh dari uji Hausman ini lebih besar dari nilai kritis statistik chi-square maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti model yang tepat untuk regresi data panel adalah Fixed effect, begitu juga pada pengaruh sebaliknya (Shochrul dkk, 2011).

### 3.4.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2003), ada 11 asumsi utama yang mendasari model regresi linear klasik dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS), yaitu sebagai berikut :

- a) Model regresi linear, artinya linear dalam parameter.
- b) Nilai X diasumsikan non-stokastik, artinya nilai dari X dianggap tetap dalam sampel yang berulang
- c) Nilai rata-rata kesalahan  $\mu_i$  adalah nol
- d) Homoskedastisitas, artinya varians kesalahan sama untuk setiap periode
- e) Tidak ada autokorelasi dalam gangguan/kesalahan
- f) Antara  $\mu_i$  dan  $\mu_j$  saling bebas
- g) Jumlah observasi harus lebih besar dari jumlah variabel independen
- h) Adanya variabilitas yang cukup dalam nilai X, artinya nilai X harus berbeda tidak boleh sama semua
- i) Model regresi telah dispesifikasi secara benar, dengan kata lain tidak ada bias (kesalahan) spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empirik
- j) Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel independen

k) Nilai kesalahan  $\mu_i$  terdistribusi secara normal

Untuk melakukan pengujian asumsi klasik, ada empat uji asumsi yang harus dilakukan, yaitu deteksi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

#### A. Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas dalam pengujian asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah nilai error dalam model regresi terdistribusi normal ataukah tidak. Untuk melihat model regresi terdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan Jarque-Bera test (J-B test). Hipotesisnya adalah :

$H_0$  : sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal

$H_1$  : sampel yang berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Dalam pengujian ini, apabila probabilitas Jarque-Bera kurang dari  $X^2$  ( chi square) tabel pada tingkat signifikansi 5% maka data dapat dikategorikan berdistribusi normal atau dengan kata lain  $H_0$  diterima, begitu juga sebaliknya (Wing Wahyu, 2009).

Rumus J-B hitung :

$$J-B_{hitung} : \left[ \frac{s^2}{6} + \left( \frac{k-3}{24} \right)^2 \right] \dots\dots\dots (3.12)$$

Dimana :

S : skewness statistik

K : kurtosis

## **B. Deteksi Multikolinearitas**

Menurut Gujarati (2003), multikolinearitas berarti adanya hubungan sempurna atau pasti antara beberapa variabel independen dalam model regresi. Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Sifat dari multikolinearitas sendiri adalah mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, sehingga dengan adanya multikolinearitas menyebabkan terjadinya kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak dipercaya.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model adalah dengan mengestimasi model awal dalam persamaan sehingga mendapat nilai R Squared. Jika nilai  $R^2$  yang dihasilkan sangat tinggi, namun secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen, maka diduga model terdapat multikolinearitas.

## **C. Deteksi Heteroskedastisitas**

Deteksi heteroskedastisitas dalam model regresi linear klasik bertujuan untuk menguji apakah disturbance term memiliki varians sama atau tidak dalam model persamaan regresi. Jika disturbance term memiliki varians yang sama itu berarti model terdeteksi mengalami homoskedastisitas, begitu juga sebaliknya.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji park atau uji breusch-pagan. Apabila dari hasil uji didapati bahwa koefisien parameter untuk masing-masing variabel

independen bersifat signifikan (dengan tingkat kepercayaan 5%) maka data bersifat heteroskedastisitas begitu pula sebaliknya (Wing Wahyu, 2009).

#### D. Deteksi Autokorelasi

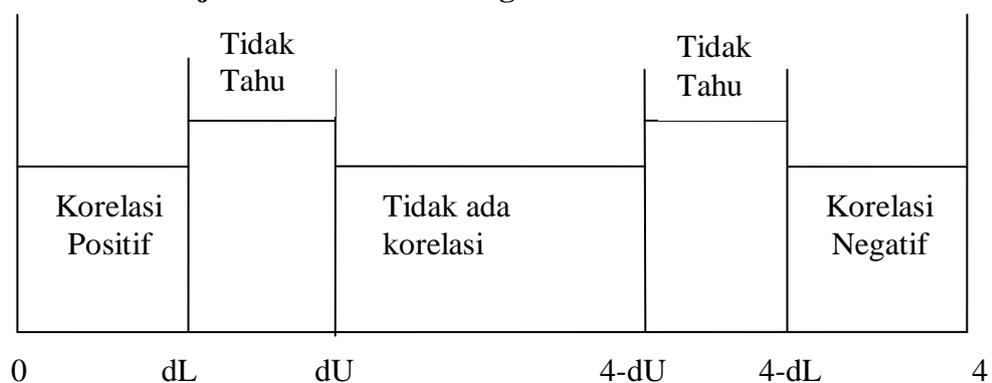
Deteksi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara gangguan  $\mu_i$  pada periode  $t$  dengan gangguan  $\mu_i$  pada periode  $t-1$ . Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang diamati menjadi bias dan variansnya tidak minimum, sehingga tidak efisien (Nachrowi, 2002). Pengujian dengan menggunakan uji Durbin Watson untuk melihat gejala autokorelasi.

**Tabel 3.1**  
**Kriteria Pengujian Durbin Watson**

| Hipotesis Nol                  | Keputusan           | Kriteria            |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ada autokorelasi positif       | Tolak               | $0 < d < d_l$       |
| Tidak ada autokorelasi positif | Tidak ada keputusan | $d_l < d < d_u$     |
| Ada autokorelasi negatif       | Tolak               | $4-d_l < d < 4$     |
| Tidak ada autokorelasi negatif | Tidak ada keputusan | $4-d_u < d < 4-d_l$ |
| Tidak ada autokorelasi         | Jangan tolak        | $d_u < d < 4-d_u$   |

Sumber : Nachrowi, 2002

**Gambar 3.1**  
**Aturan membandingkan**  
**Uji Durbin Watson dengan Tabel Durbin Watson**



Sumber : Nachrowi, 2002

Tabel DW terdiri dari dua nilai yaitu batas bawah ( $dL$ ) dan batas atas ( $dU$ ). Nilai ini dapat digunakan sebagai pembanding uji DW, dengan aturan sebagai berikut:

- Bila  $DW < dL$  Berarti ada korelasi positif atau kecenderungannya  $\rho = 1$
- Bila  $dL \leq DW < dU$  Berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apapun
- Bila  $dU < DW < 4-dU$  Berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif
- Bila  $4-dU \leq DW \leq dL$  Berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apapun
- Bila  $DW > 4$  Berarti ada korelasi negatif

### 3.4.3 Pengujian Statistik

Pengujian asumsi klasik telah selesai dilakukan sehingga langkah yang dilakukan setelahnya adalah melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t dan uji f. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menguji signifikansi (pengaruh nyata) dari variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model dinyatakan bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Kedua uji yang harus dilakukan dalam pengujian statistika adalah sebagai berikut:

#### A. Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan dengan variasi dari variabel independen. Rentang nilai untuk  $R^2$  bernilai dari 0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekati 1, maka hasil semakin baik. Nilai  $R^2$  yang memiliki nilai kecil

(mendekati nol), mengindikasikan bahwa kemampuan suatu variabel dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, begitu juga dengan pengaruh dari hasil sebaliknya.

Penggunaan determinasi memiliki kelemahan yaitu pada bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Dimana setiap tambahan satu variabel independen pasti meningkatkan hasil keluaran  $R^2$  tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Oleh karena itu banyak dari peneliti menganjurkan untuk menggunakan adjusted  $R^2$  pada saat mengevaluasi model regresi terbaik.

## **B. Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak ( Uji F )**

Uji F pada dasarnya digunakan dalam pengujian statistika untuk melakukan uji serentak dari variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan untuk uji F ini adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$H_1$  : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 2004)

Untuk mencari nilai dari F hitung, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Suharyadi, 2004) :

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{\frac{1-R^2}{(N-k)}} \dots\dots\dots (3.13)$$

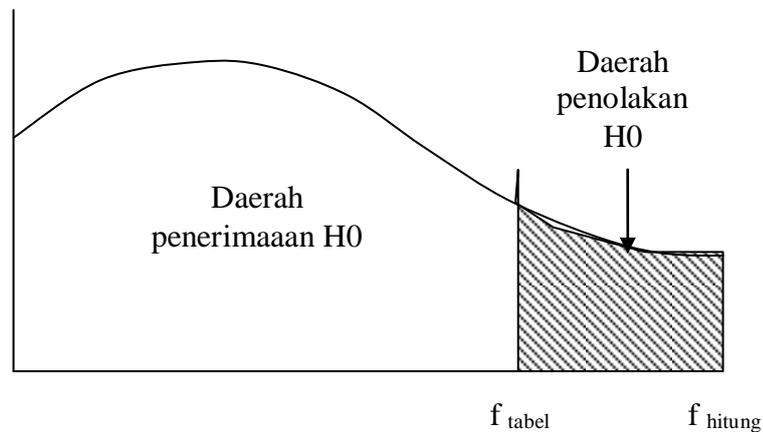
Dimana;

N : jumlah observasi

$k$  : jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

Untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  dapat menggunakan kriteria sebagai berikut :

**Gambar 3.2**  
**Uji F Hipotesis Secara Simultan Menggunakan Uji satu arah ( $\alpha = 0,05$ )**



Sumber : Suharyadi, 2004

Berdasarkan kriteria gambar, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Diterima  $H_0$   $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_1$  ditolak yang artinya seluruh variabel independen bukan merupakan penjelas terhadap variabel dependen.
- b. Ditolak  $H_0$  apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima yang artinya variabel independen merupakan penjelas terhadap variabel dependen .

### C. Pengujian Signifikansi Parameter secara Individual ( Uji t)

Jika sebelumnya uji F digunakan untuk melakukan uji serentak dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka untuk melakukan uji secara individual dapat menggunakan uji t. Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi signifikan atau tidak secara

individual. Langkah pertama sebelum melakukan pengujian biasanya hipotesis dibuat terlebih dahulu. Hipotesis yang lazim berlaku dalam uji t adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = 0$                     tidak ada pengaruh antara variabel pendapatan dengan kemiskinan.

$H_1 : \beta_1 < 0$                     ada pengaruh negatif antara variabel pendapatan dengan kemiskinan

$H_0 : \beta_2 = 0$                     tidak ada pengaruh antara variabel harapan hidup dengan kemiskinan.

$H_1 : \beta_2 < 0$                     ada pengaruh negatif antara variabel harapan hidup dengan kemiskinan

$H_0 : \beta_3 = 0$                     tidak ada pengaruh antara variabel pendidikan (angka melek huruf) dengan variabel dependen kemiskinan.

$H_1 : \beta_3 < 0$                     ada pengaruh negatif antara variabel pendidikan (angka melek huruf) dengan variabel dependen kemiskinan.

$H_0 : \beta_4 = 0$                     tidak ada pengaruh antara variabel pendidikan (lama sekolah) dengan variabel dependen kemiskinan.

$H_1 : \beta_4 < 0$                     ada pengaruh negatif antara variabel pendidikan (lama sekolah) dengan variabel dependen kemiskinan

Dimana perhitungan untuk uji-t ini adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_n - \beta_n^*}{SE(\beta_n)} \dots\dots\dots (3.14)$$

Keterangan :

$\beta_n$ : parameter yang diestimasi

$\beta_n^*$  : nilai hipotesis dari  $\beta_n$  ( $H_0 = \beta_n = \beta_n^*$ )

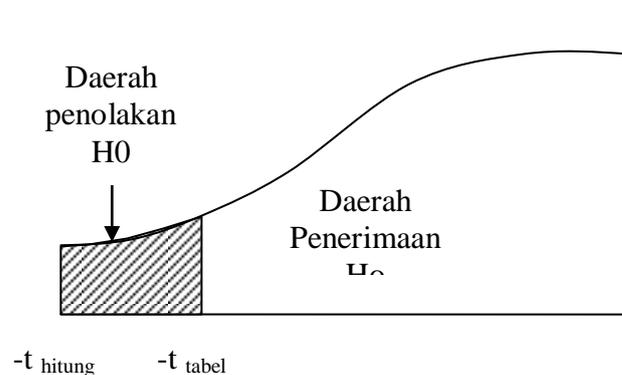
SE ( $\beta_n$ ) : simpangan baku  $\beta_n$

Berdasarkan kriteria gambar maka untuk menentukan kesimpulan dengan menggunakan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  . Kriteria pengambilan keputusan untuk nilai  $t$  negatif sebagai berikut :

- Diterima  $H_0$  jika hasil  $-t_{tabel} > -t_{hitung}$  maka  $H_1$  ditolak yang artinya variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Ditolak  $H_0$  jika hasil  $-t_{tabel} < -t_{hitung}$  maka  $H_1$  diterima yang artinya variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

**Gambar 3.3**

**Uji t Hipotesis Secara Parsial Menggunakan Uji satu arah ( $\alpha = 0,05$ )**



Sumber : Suharyadi, 2004

### 3.4.4 Estimasi Model

Penelitian ini menggunakan data time series selama 5 tahun yang diwakili dengan data tahunan dari tahun 2006 s/d 2010, untuk masing-masing variabel

yang diteliti dan data cross section berasal dari 35 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang tersedia, karena jumlah data cross section (i) besar dan data time series (t) kecil maka model asumsi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode FEM. Untuk mengestimasi model regresi data panel dengan pendekatan fixed effect tergantung pada asumsi yang digunakan pada intersep, error term dan koefisien slope, dimana ada beberapa kemungkinan asumsi yaitu :

- a) Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar waktu (time) dan ruang (space) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu.
- b) Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu
- c) Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan waktu
- d) Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar individu
- e) Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan waktu

Alasan lain penggunaan asumsi FEM ini sebagaimana pertimbangan yang disampaikan judge bahwa unit cross section pada penelitian tidak diambil secara acak dan jumlah observasi hanya 175 observasi. Untuk jumlah observasi yang REM lebih sering digunakan untuk observasi dengan data diatas 1000. Asumsi dalam FEM yang digunakan dalam penelitian ini adalah asumsi koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Dalam artian intersep dari setiap individu diasumsikan memiliki perbedaan yang dikarenakan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam hal ini kabupaten/kota. Untuk melakukan asumsi tsb diperlukan variabel dummy untuk memberikan nilai

perbedaan pada masing-masing kabupaten/kota. Oleh sebab itu asumsi FEM sering disebut sebagai least square dummy variabel.

Dengan mengasumsikan bahwa model telah linier dalam parameter, maka sesuai metode yang digunakan model persamaan dalam penelitian ini menjadi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{POV}_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log INC}_{it} + \beta_2 \text{Log HEAL}_{it} + \beta_3 \text{Log EDU(MH)}_{it} + \beta_4 \text{Log EDU(LS)}_{it} \\ & + \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \alpha_4 D_4 + \alpha_5 D_5 + \alpha_6 D_6 + \alpha_7 D_7 + \alpha_8 D_8 + \alpha_9 D_9 + \alpha_{10} D_{10} \\ & + \alpha_{11} D_{11} + \alpha_{12} D_{12} + \alpha_{13} D_{13} + \alpha_{14} D_{14} + \alpha_{15} D_{15} + \alpha_{16} D_{16} + \alpha_{17} D_{17} + \alpha_{18} D_{18} + \alpha_{19} D_{19} \\ & + \alpha_{20} D_{20} + \alpha_{21} D_{21} + \alpha_{22} D_{22} + \alpha_{23} D_{23} + \alpha_{24} D_{24} + \alpha_{25} D_{25} + \alpha_{26} D_{26} + \alpha_{27} D_{27} + \alpha_{28} D_{28} \\ & + \alpha_{29} D_{29} + \alpha_{30} D_{30} + \alpha_{31} D_{31} + \alpha_{32} D_{32} + \alpha_{33} D_{33} + \alpha_{34} D_{34} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.11) \end{aligned}$$

Dimana,

POV : tingkat kemiskinan

Log INC : Logaritma pendapatan perkapita

Log HEAL : Logaritma kesehatan / harapan hidup

Log EDUmh : Logaritma angka melek huruf

Log EDUls : Logaritma rata-rata lama sekolah

$\beta_0$  : konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : koefisien variabel bebas

$\alpha_1 - \alpha_{35}$  : koefisien variabel dummy

$\mu_{it}$  : komponen error waktu t untuk unit cross section i

i = 1,2,3,4,....., 34 ( data cross section kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah)

t = 1,2,3,4,5 (data time series tahun 2006 s/d 2010)

$D_1$  : dummy Kab. Cilacap

$D_{19}$  : dummy Kab. Kudus

|                 |                           |                 |                         |
|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| D <sub>2</sub>  | : dummy Kab. Banyumas     | D <sub>20</sub> | : dummy Kab. Jepara     |
| D <sub>3</sub>  | : dummy Kab. Purbalingga  | D <sub>21</sub> | : dummy Kab. Demak      |
| D <sub>4</sub>  | : dummy Kab. Banjarnegara | D <sub>22</sub> | : dummy Kab. Semarang   |
| D <sub>5</sub>  | : dummy Kab. Kebumen      | D <sub>23</sub> | : dummy Kab. Temanggung |
| D <sub>6</sub>  | : dummy Kab. Purworejo    | D <sub>24</sub> | : dummy Kab. Kendal     |
| D <sub>7</sub>  | : dummy Kab. Wonosobo     | D <sub>25</sub> | : dummy Kab. Batang     |
| D <sub>8</sub>  | : dummy Kab. Magelang     | D <sub>26</sub> | : dummy Kab. Pekalongan |
| D <sub>9</sub>  | : dummy Kab. Boyolali     | D <sub>27</sub> | : dummy Kab. Pemasang   |
| D <sub>10</sub> | : dummy Kab. Klaten       | D <sub>28</sub> | : dummy Kab. Tegal      |
| D <sub>11</sub> | : dummy Kab. Sukoharjo    | D <sub>29</sub> | : dummy Kab. Brebes     |
| D <sub>12</sub> | : dummy Kab. Wonogiri     | D <sub>30</sub> | : dummy Kota Magelang   |
| D <sub>13</sub> | : dummy Kab. Karanganyar  | D <sub>31</sub> | : dummy Kota Surakarta  |
| D <sub>14</sub> | : dummy Kab. Sragen       | D <sub>32</sub> | : dummy Kota Salatiga   |
| D <sub>15</sub> | : dummy Kab. Grobogan     | D <sub>33</sub> | : dummy Kota Pekalongan |
| D <sub>16</sub> | : dummy Kab. Blora        | D <sub>34</sub> | : dummy Kota Tegal      |
| D <sub>17</sub> | : dummy Kab. Rembang      | D <sub>35</sub> | : dummy Kota Semarang   |
| D <sub>18</sub> | : dummy Kab. Pati         |                 |                         |

Dalam model panel pendekatan Fixed Effect, penggunaan variabel dummy merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengolahan data. Oleh karena dalam penelitian ini menggunakan model pendekatan Fixed Effect maka untuk memenuhi prasyarat sebelum pengolahan data, variabel dummy yang akan digunakan adalah dummy wilayah. Kota yang akan digunakan sebagai wilayah acuan (benchmark) dalam penelitian ini adalah Kota Semarang. Kota

Semarang terpilih sebagai wilayah acuan, karena perkembangan tingkat kemiskinan di kota ini bisa dikatakan terendah dari wilayah lain di Jawa Tengah.

### 3.5 Proyeksi Kemiskinan

Metode peramalan adalah suatu teknik yang biasa digunakan untuk memprediksi atau memperkirakan suatu nilai pada masa yang akan datang dengan memperhatikan data atau informasi masa lalu maupun saat ini baik secara matematik maupun statistik. Dalam penelitian ini metode peramalan menggunakan model persamaan trend (Supranto, 1993) :

$$\hat{Y}_t = a + bX_t \dots\dots\dots (3.15)$$

Dimana,

$\hat{Y}_t$  = Nilai trend kemiskinan periode tertentu

a = Nilai  $\hat{Y}$ , kalau  $X_t=0$

b = koefisien slope trend kemiskinan

$X_t$  = variabel waktu

Untuk langkah pertama sebelum melakukan proyeksi adalah dengan mencari trend masing – masing variabel independen dengan menggunakan formula TREND dengan bantuan Eviews dan Excel. Jika keempat variabel tersebut telah diketahui trend tahun mendatang, maka secara langsung kita dapat memproyeksi tingkat kemiskinan ditahun yang akan datang dengan menggunakan metode regresi sederhana. Berikut model proyeksi yang digunakan :

$$\begin{aligned} \text{POV}_{2006-2017} = & \alpha_0 + \beta_1 \text{INC}_{2006-2017} + \beta_2 \text{HEAL}_{2006-2017} + \beta_3 \text{EDU(MH)}_{2006-2017} \\ & + \beta_4 \text{EDU(LS)}_{2006-2017} + U_i \dots\dots\dots / \dots\dots\dots \end{aligned} \quad (3.16)$$

Asumsi yang digunakan adalah :

- a) Untuk melihat hasil proyeksi trend kemiskinan, maka variabel lain yang mempengaruhi kemiskinan, di luar variabel independen waktu di dalam model dianggap konstan
- b) Kondisi stabilitas ekonomi sebelum dan sesudah proyeksi dianggap normal